

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

RAHMANSAH

NIM: 015627775

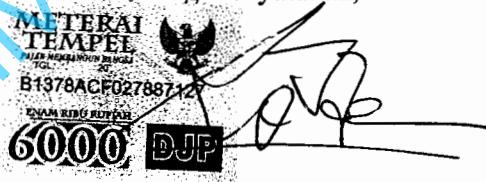
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Desember 2012

Yang menyatakan,



Rahmansah

NIM. 015627775

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan
 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyusun TAPM : Rahmansah

NIM : 015627775

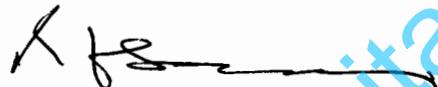
Program Studi : Magister Manajemen

Hari/Tanggal :

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ferdinand D. Saragih, M.A
 NIP. 19610803 198702 1 002



Dr. A.A. Ketut Budiastri, M.Ed
 NIP. 19640324 199103 1 001

Mengetahui

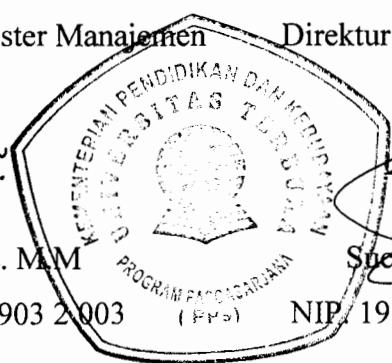
Ketua Bidang Ilmu Magister Manajemen Direktur Program Pascasarjana



Maya Maria, SE, MM
 NIP. 19720501 199903 2 003



Suciati, M.Sc., Ph.D.
 NIP. 19520213 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : Rahmansah
 NIM : 015627775
 Judul TAPM : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan
 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Pengaji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : MINGGU, 9 DESEMBER 2012
 Waktu : 08.00 s/d 10.00 WIB.

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Pengaji TAPM

Ketua Komisi Pengaji
 Drs Yun Iswanto, M.Si :

Pengaji Ahli
 Dr. Mahyus Ekananda, M.M., MSE :

Pembimbing I
 Prof. Dr. Ferdinand D. Saragih, M.A :

Pembimbing II
 Dr. A.A. Ketut Budiastri, M.Ed :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Rektor Universitas Terbuka;
- (2) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (3) Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (4) Pembimbing I: Prof. Dr. Ferdinand D. Saragih, M.A dan Pembimbing II: Dr. A.A. Ketut Budiastri, M.Ed yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (5) Kepala Bidang Magister Manajemen selaku penanggungjawab program Magister Manajemen;
- (6) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
- (7) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pangkalpinang, Desember 2012

Penulis

ABSTRAC

Factors Influencing Successful Implementation of Government Regulation Nomor 71 of 2010 on Provincial Government of Bangka Belitung Islands

Keywords: government regulation Nomor 71 of 2010 on accounting standards accrual-based government accounting standards. Regulation, commitment, human resources, and supporting devices.

This purpose of this research is to (a) find out a clear overview of factors supporting successful implementation of Government Regulation Nomor 71 of 2010 regarding Accrual Based Government Accounting Standards, which are regulations, commitment, human resources, and supporting devices, (b) determine how the influence of regulation, commitment, human resources, and device to support the successful implementation of Government Regulation Nomor 71 of 2010 regarding Accrual based Government Accounting Standards, (c) provides an advice that could help the provincial government of Bangka-Belitung island in solving problems faced by especially problems examined which are the successful implementation of Government Regulation Nomor 71 of 2010 regarding Accrual based Government Accounting Standards which influenced by the regulatory aspects, commitment, human resources, and supporting devices.

This study uses a causal design and simple random sampling as a sampling method. This research uses questionnaire as a research instrument and SPSS program to process the data. The test consists of reliability and validity test, normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. This research uses multiple regression as analysis tools.

The result shows that (a) regulation, commitment, human resources, and supporting devices are able to explain the successful implementation of Government Regulation Nomor 71 of 2010 regarding Accrual Based Government Accounting Standards for 29.3%, (b) regulations, commitment, human resources , and supporting devices have simultaneously significant effect on successful of Government Regulation Nomor 71 ofr 2010 regarding Accrual based Government Accounting Standards, (c) partially, commitment and supporting device has no significant effect and the regulatory and human resources has significant effect on successful implementation of Government Regulation Nomor 71 of 2010 regarding Accrual based Government Accounting Standards.

ABSTRAK

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rahmansah

Universitas Terbuka

Kata kunci: peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung.

Penelitian ini bertujuan untuk (a) mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yaitu regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung, (b) mengetahui seberapa besar pengaruh dari regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, (c) mencoba memberikan saran-saran yang dapat membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi khususnya masalah yang diteliti yaitu keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang dipengaruhi oleh aspek regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain kausal. Metode pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah *simple random sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian adalah kuesioner dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS. Pengujian yang digunakan penulis meliputi uji reliabilitas dan validitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Sedangkan model penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan analisis statistik persamaan regresi linear berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikan simultan, uji signifikan parsial, dan koefisien determinan.

Hasil penelitian menemukan bahwa (a) regulasi dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (b) Komitmen dan perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Orisinalitas.....	i
Lembar Persetujuan TAPM.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat (Kegunaan) Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kebijakan Publik.....	11
B. Implementasi Kebijakan.....	17
C. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.....	20
1. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	21
2. Dasar Hukum Keuangan Daerah.....	23
3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
4. Komponen Laporan Keuangan.....	27
D. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.....	28
1. Regulasi.....	29
2. Komitmen.....	29
3. Sumber Daya Manusia.....	30

	4. Perangkat Pendukung.....	31
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.....	33
E.	Kerangka Penelitian.....	33
F.	Hipotesis.....	35
G.	Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN.....	43
A.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	43
	1. Populasi.....	43
	2. Sampel.....	44
B.	Instrumen Penelitian.....	45
C.	Prosedur Pengumpulan Data.....	47
D.	Deskripsi Data Penelitian.....	47
E.	Pengukuran Variabel.....	48
	1. Regulasi.....	49
	2. Komitmen.....	49
	3. Sumber Daya Manusia.....	49
	4. Perangkat Pendukung.....	50
	5. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.....	50
F.	Uji Reliabilitas dan Validitas.....	53
G.	Uji Normalitas.....	54
H.	Model Penelitian.....	55
I.	Pengujian Hipotesis.....	55
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
	1. Letak Geografis.....	57
	2. Keadaan Penduduk.....	58
	3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	58
	4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.	61
	5. Ekonomi Makro.....	63

B. Pengujian Validitas dan Reabilitas Data terhadap Faktor Regulasi, Komitmen, Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	66
1. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor Regulasi.....	67
2. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor Komitmen.....	68
3. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor SDM.....	69
4. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor Perangkat Pendukung.....	69
5. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	71
C. Uji Normalitas.....	72
D. Uji Multikolinearitas.....	74
E. Uji Heteroskedastisitas.....	75
F. Hasil Pengujian Hipotesis Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	76
1. Uji Signifikan Simultan (Uji – F) Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	76
2. Uji Signifikansi Parsial (Uji – t) Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	77

3.	Koefisien Determinan (R^2) Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	79
G.	Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	82
H.	Analisis Hasil Pembahasan.....	84
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....		100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Tingkat Kepadatan Penduduk.....	58
Gambar 4.2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.....	73
Gambar 4.3. Scatterplot.....	76

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Alternatif Jawaban dan Skor.....	46
Tabel 3.2. Distribusi Sebaran Kuisioner Penelitian.....	48
Tabel 3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	51
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Regulasi (X1)...	67
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Komitmen (X2)	68
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel SDM (X3).....	69
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Perangkat pendukung (X4).....	70
Tabel 4.5. Hasil Uji ke-2 Validitas Item Pertanyaan Variabel Perangkat Pendukung (X4).....	70
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	71
Tabel 4.7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	72
Tabel 4.8. Hasil Uji Coefficiens Model.....	74
Tabel 4.9. Hasil Uji F – hitung.....	77
Tabel 4.10. Hasil Uji t – hitung.....	78
Tabel 4.11. Model Summary ^b	81
Tabel 4.12. Variables Entered/Removed ^b	82

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Lembar Kuesioner.....	103
Lampiran 2. Tabel Skor Hasil Kuesioner.....	107
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Regulasi (X1).....	108
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Komitmen (X2).....	110
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel SDM (X3)....	111
Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Perangkat Pendukung (X4).....	112
Lampiran 7. Hasil Uji ke-2 Validitas Item Pertanyaan Variabel Perangkat Pendukung (X4).....	113
Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Y).....	114
Lampiran 9. Hasil Uji Data Statistik <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	115
Lampiran 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	116
Lampiran 11. Charts.....	121
Lampiran 12. Tabel r.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sudah diperbaharui pula dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Tuntutan untuk dilakukannya evaluasi dan revisi Undang-undang otonomi daerah muncul karena adanya kecenderungan penyimpangan pelaksanaan otonomi di daerah.

Transparansi dan akuntabilitas publik pada era otonomi daerah telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di Indonesia. Pada dasarnya, transparansi dan akuntabilitas publik tersebut tidak hanya menjadi masalah negara berkembang seperti Indonesia saja, namun negara yang sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktik akuntabilitas lembaga sektor publiknya. Disamping itu, program-program pembangunan yang dianjurkan oleh World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP) saat ini juga menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Dalam hal ini Pemerintah diminta untuk bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban publiknya.

Pada tahun 2005, Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara yaitu dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Sesuai amanat UU Nomor 22 tahun 1999 yang

sekarang direvisi menjadi UU Nomor 33 tahun 2004, kemudian PP Nomor 105 tahun 2000 dan UU Nomor 17 tahun 2003, penyusunan penyajian laporan keuangan pusat dan daerah didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jadi, Standar Akuntansi Pemerintah dapat disimpulkan sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD haruslah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Basis akuntansi yang digunakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut adalah basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan; basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas, atau secara keseluruhan dikenal sebagai basis "*cash toward accrual*".

Sementara itu, pasal 70 ayat 2 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menetapkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Pada tahun 2010, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) "Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual". Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010: 16) Jika dicermati kelebihan dan kelemahannya maka kelebihan *cash basis* adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan *cash basis* tidak dapat diukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau kebijakan dengan baik. Teknik akuntansi berbasis akrual dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya

jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah. (Komite Standar Akuntansi Pemerintah Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, 2006).

Bagi pemerintah daerah, peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah akan tercermin dari opini yang dikeluarkan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan opini yang diperolehnya, yang sebelumnya disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ataupun mendapatkan opini yang tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Unsur-unsur utama kualifikasi dalam pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung antara lain sebagai berikut (BPKP, 2010):

1. Kelemahan di dalam pengelolaan aset dan persediaan.
2. Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

3. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum dijalankan secara konsisten.
4. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana yang belum akuntabel.
5. Akuntabilitas penyertaan dan penempatan modal pemerintah daerah yang belum tertib.
6. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum dijalankan secara konsisten merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan hasil audit atas laporan keuangan yang tersaji di buku I Laporan BPK memperlihatkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menjalankan kebijakan akuntansi secara konsisten yang terlihat dari masih banyaknya temuan-temuan audit yang diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sudah lebih kurang 2 (dua) tahun diberlakukan, namun sampai saat ini masih belum seluruh Pemerintah Daerah dapat menerapkan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam peraturan pemerintah tersebut. Kurangnya sosialisasi dan masih sedikitnya aparat di pemerintah daerah yang memahami akuntansi berbasis akrual menyebabkan lambatnya penerapan peraturan ini.

Akuntansi berbasis akrual telah berhasil diterapkan di berbagai negara maju dan membawa manfaat. Manfaat akuntansi berbasis akrual antara lain (Van Der Hoek, 2005):

1. Mendukung manajemen kinerja.
2. Menfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik.

3. Memperbaiki pengertian akan biaya program.
4. Memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya.
5. Meningkatkan pelaporan keuangan.
6. Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di lingkungan pemerintahan merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh birokrasi yang berintegritas.

Regulasi yang baik adalah penting, sebab diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dalam pembuatan aturan-aturan pelaksanaan harus juga profesional dan bertanggung jawab, jadi tidak hanya pihak-pihak yang akan melaksanakan saja yang harus mematuhi atau mengikuti aturan-aturan tapi pihak regulator atau pembuat aturan tidak mau mendengar, melihat dan memperhatikan *best practice* sekaligus diadakan uji publik dahulu setelah itu baru diimplementasikan, sehingga tidak membuat aparatur di daerah menjadi bingung. Hal ini dapat dimaklumi karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 baru saja diterbitkan dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, aparatur pemerintah daerah baru memahami dan melaksanakan aturan yang diberlakukan tahun anggaran 2005 (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 - *cash towards accrual*) kemudian pada tahun anggaran 2010 harus berubah mengikuti aturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Khusus dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tuntutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dimana setiap SKPD harus menyusun laporan keuangannya masing-masing.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan melakukan pembenahan diri baik dalam hal sumber daya manusia maupun perangkat pendukungnya yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 serta komitmen yang kuat demi terwujudnya keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Usman, 2010). Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi.

Banyak penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual adalah strategi implementasi yang direncanakan dengan baik, komitmen, tujuan yang dikomunikasikan secara jelas, sumber daya manusia yang andal, dan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan. (Komite Standar Akuntansi Pemerintah Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; 2006).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pemerintah daerah. Penelitian yang dilaksanakan akan dibatasi pada instansi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena dari laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh informasi bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut belum menerapkan akuntansi berbasis akrual.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh suatu gambaran bahwa permasalahan yang diteliti adalah masih belum maksimal dan belum sesuaiannya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas maka permasalahan pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini bagaimanakah pengaruh regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Secara lebih rinci masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh regulasi terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?
2. Bagaimanakah pengaruh komitmen terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

3. Bagaimakah pengaruh SDM terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?
4. Dan bagaimakah pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2007) "Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh", maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti empiris bahwa regulasi, komitmen, Sumber Daya Manusia, dan perangkat pendukung mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Secara lebih rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana regulasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Untuk menganalisis bagaimana komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Untuk menganalisis bagaimana Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
4. dan Untuk menganalisis bagaimana perangkat pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

D. Manfaat (Kegunaan) Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat memberikan jawaban tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dasar pertimbangan dan bahan masukan bagi pemerintah daerah agar menjadi acuan dalam membuat keputusan khususnya dalam membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, melakukan pembenahan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dan menambah perangkat pendukung sesuai dengan kebutuhan demi terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang baik.
3. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Nugroho (2003: 77) mengatakan terdapat banyak jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya yang diletakkan dalam konteks kebijakan publik yakni, jenis pelayanan yang berbentuk distributif, redistributif dan regulatif. Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku dari pada organisasi. Kebijakan membatasi ruang lingkup yang dalam dengan menetapkan pedoman untuk pemikiran pengambilan keputusan dan menjamin bahwa keputusan yang diperlukan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian tujuan yang menyeluruh. Menurut pendapat Harold Koontz yang dikutip Malayu S.P. Hasibuan (1996: 99) dalam bukunya *Manajemen Dasar pengertian dan Masalah mendefinisikan pengertian kebijakan, yaitu:*

"Kebijakan adalah pernyataan-pernyataan atau pengertian-pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan yang fungsinya adalah menandai lingkungan sekitar yang dibuat sehingga memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan itu akan sesuai dengan tercapainya tujuan".

Selanjutnya menurut Kraft, et.al (2007: 5), kebijakan publik dapat dipostulasikan sebagai seberikut :

"Public Policy is a course of government action or inaction in response to public problems. It is associated with formally approved policy goals and means, as well as the regulations and practices of agencies that implement programs".

Pernyataan di atas menjelaskan, bahwa kebijakan publik adalah sikap pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka menanggapi permasalahan masyarakat. Kebijakan publik tersebut berkaitan dengan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sumber daya yang telah disetujui secara formal dan berkekuatan hukum termasuk regulasi dan pelaksanaan terhadap program-program yang telah direncanakan.

Konteks hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat dilihat melalui pengertian pelayanan publik menurut Saefullah (1999:5) yang mengatakan "Pelayanan publik (public service) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan". Sedangkan Rasyid (1997:116) mengungkapkan bahwa:

"Pelayanan berkenaan usaha pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin bahwa warga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan mereka secara wajar, dan ditujukan juga untuk membangun dan memelihara keadilan masyarakat".

Lebih lanjut Rasyid (1997: 139) mengungkapkan bahwa :

"Pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diindakkan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama".

Sehubungan dengan itu, William Dunn (1998: 24) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari empat tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. *Agenda setting* adalah sebuah fasilitasi dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam

proses penyusunan agenda memiliki ruang untuk memuknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan, tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/Evaluasi, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Evaluasi yang dilakukan untuk menilai baik atau tidaknya kebijakan publik menurut Kraft, et.al (2007: 26) dapat dilakukan sekurang-kurang dengan mengkaji delapan elemen utama, sebagai berikut.

1. Elemen "*effectiveness*" : apakah kebijakan program yang dibuat dapat dilaksanakan dan seberapa besar kemungkinan tujuan kebijakan atau sasaran perencanaan dapat dicapai;
2. Elemen "*efficiency*" : apakah suatu kebijakan atau proposal kebijakan anggaran akan memberikan benefit kepada masyarakat;
3. Elemen "*liberty/freedom*" : mengisyaratkan bahwa kebijakan publik juga harus memperhatikan hak azasi manusia;
4. Elemen *equity* : apakah kebijakan tersebut dibuat dengan proses yang terbuka dan "*fair*" untuk semua komponen masyarakat tanpa membeda-bedakan suku bangsa, ras, agama dan golongan;
5. Elemen "*political feasibility*" : berkaitan dengan *acceptability* kebijakan tersebut secara politis. Dalam aliran demokrasi, pada saat menyusun konsep kebijakan maka para pembuat kebijakan harus memouka diri dan memperhatikan tanggapan dari berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, kelompok kepentingan (*interest group*), dan pejabat-pejabat pemerintah yang lainnya;
6. Elemen "*social feasibility*" : berkaitan dengan tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat kepada kebijakan publik tersebut;
7. Elemen "*administrative feasibility*" adalah kemungkinan jajaran birokrasi dapat melaksanakan kebijakan sesuai yang diharapkan;
8. Elemen "*technical feasibility*" adalah berkaitan dengan "*availability*" dan "*realibility*" teknologi yang dibutuhkan untuk mengimplementasi kebijakan.

Pendapat Kraft tersebut selaras dengan Duna (2003: 17) yang menyatakan bahwa dalam menganalisa sebuah kebijakan terdiri atas lima prosedur yang layak dilalui, yaitu :

1. Memahami hakikat permasalahan yang ada, dan kemudian dibuat perumusan masalahnya;
2. Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah tersebut dan apa hasilnya, hal ini terkait dengan masa depan masalah yang ada;
3. Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah;
4. Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah;
5. Hasil apa yang bisa diharapkan dari proses tersebut.

Penemuan-penemuan atau jawaban dari kelima pertanyaan prosedural di atas akan memberikan informasi tentang metodologi analisis kebijakan yang sering dipakai yaitu; definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Pada tahapan definisi akan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Pada tahapan prediksi akan menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu. Pada tahapan prekripsi akan menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa yang akan datang. Pada tahapan deskripsi akan menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan (Nugroho, 2008: 132).

Analisis kebijakan publik menurut Dunn (2003: 21) dapat dilakukan melalui prosedur-prosedur tersebut dan selanjutnya dioperasionalisasikan dengan permasalahan yang ada. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk untuk tidak melakukan suatu kebijakan tertentu. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan atas pemecahan suatu masalah

kebijakan. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah.

Keberadaan dan efektifitas pelayanan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari dinamika maupun evaluasi kebijakan institusional yang senantiasa berkembang di setiap wilayah pemerintahan. Tak kurang dari Buchholz (1990: 121-122), ikut angkat bicara menyangkut evaluasi kebijakan dalam sebuah pemerintahan. Dengan lugas ia mengurai bahwa evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) adalah upaya pemerintah untuk menentukan apakah sebuah kebijakan sudah berjalan efektif atau belum. Atau, bisa jadi langkah-langkah evaluasi kebijakan itu juga berarti mencoba untuk mengetahui berjalannya sebuah program pemerintah.

William Dunn (2003: 17) mengatakan dalam menganalisa sebuah kebijakan terdiri atas 5 prosedur yang layak dilalui, yaitu (1) memahami hakikat permasalahan yang ada, dan kemudian dibuat perumusan masalahnya (2) kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah tersebut dan apa hasilnya, hal ini terkait dengan masa depan masalah yang ada (3) seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah (4) alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah (5) hasil apa yang bisa diharapkan dari proses tersebut.

Masih menurut Dunn (2003: 21), bahwasanya dalam analisis kebijakan, prosedur-prosedur tersebut dioperasionalisasikan dengan permasalahan yang ada. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (prediksi) menyediakan

informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk untuk tidak melakukan suatu kebijakan tertentu. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan atas pemecahan suatu masalah kebijakan. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah.

Kebijakan tidak akan bermakna apa-apa tanpa diimplementasikan atau dilaksanakan. Kebijakan yang tidak diimplementasikan tidak akan memberikan kontribusi apa pun terhadap kehidupan. Jadi, implementasi kebijakan merupakan hal penting, yang babkan lebih penting dibandingkan formulasi kebijakan.

B. Implementasi Kebijakan

Menurut Daft (2003: 285), implementasi merupakan langkah dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administratif dan persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih ke dalam tindakan. Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (dalam Shafritz, Russell & Borick, 2007: 65) melukiskan implementasi kebijakan sebagai:

“memahami apa yang senyataanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian dari kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.”

Di sini tampak jelas bahwa implementasi kebijakan mencakup segenap kejadian dan kegiatan pasca pengesahan kebijakan, baik yang terkait dengan kegiatan administrasi hingga dampaknya. Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan (*policy makers*) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok susarannya.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Supaya kebijakan dapat diimplementasikan, Jones (1994: 296-324) mengemukakan tiga kegiatan untuk mengoperasikan program bagi implementasi kebijakan, yaitu: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Organisasi merefleksikan bentuk pelaksanaan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit kerja serta metode untuk menjadikan suatu kebijakan dapat dilaksanakan dan

kemudian memiliki dampak tertentu. Interpretasi terkait dengan usaha menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Sedangkan aplikasi merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Dengan demikian, implementasi kebijakan sekurang-kurangnya membutuhkan organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Untuk memperkaya pemahaman, dalam kesempatan ini penulis mengutip pandangan Edwards III (1980: 16-20), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya Manusia

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik

bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi implementasi untuk menyajikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2010 dan seterusnya. Masa transisi ini akan berlangsung sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sampai dengan dikembangkan dan diimplementasikannya sistem akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah secara penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Menurut Chabib Soleh, dkk. (2010: 10-11) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berprilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

b. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan Pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilukukannya pengelolaan dana publik (*publik money*) berdasarkan konsep *value for money*, diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik. Hal tersebut akan dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

c. Kejujuran Dalam Mengelola Keuangan Publik (*probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dpercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

d. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan

daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

e. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering di evaluasi, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat segera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

2. Dasar Hukum Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum juga berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual), diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Kas menuju Akrual / *cash towards accrual*);

3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Proses pencatatan akuntansi memerlukan pijakan dalam melakukan pengakuan dan pengukuran. Basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun,

baik kerangka konseptual maupun pertanyaan-pertanyaannya, terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.

Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan terpengaruh oleh pemilihan basis akuntansi, terutama bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan informasi atau unsur yang harus dilaporkan.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010: 103-105) dalam praktik akuntansi sektor publik, terdapat empat macam basis akuntansi yang biasa digunakan, antara lain:

- a. Basis Kas, mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan.
- b. Basis Akrual, mengakui transaksi ketika transaksi yang bersangkutan secara ekonomi terjadi, tidak semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan.
- c. Basis Kas Modifikasi, sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas, sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas.
- d. Basis Akrual Modifikasi, pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar.

Standar akuntansi pemerintahan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis *full accrual* (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembukaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca).

Pada dasarnya, jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengertih perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual.

Basis akrual menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka nilai lebih yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini

diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Aktivitas atau Laporan Surplus/Defisit.

4. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, laporan keuangan terdiri atas:

- a. Neraca (*Statement of Financial Position*);
- b. Laporan Kinerja Keuangan (*Statement of Financial Performance*);
- c. Laporan Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas (*Statement of Changes In Net Assets/Equity*);
- d. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*); dan
- e. Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan (*Accounting Policies and Notes to The Financial Statements*).

Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan basis akuntansi kas menuju akrual, laporan keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari perbandingan di atas, tampak bahwa perbedaan utama antara komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menerapkan basis akrual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju akrual yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 22 Oktober 2010, adalah terdapat Laporan Kinerja Keuangan (*Statement of Financial Performance*).

II. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Dari penelitian yang dilakukan Azhar 2007 pada Pemerintah Kota Banda Aceh menyimpulkan bahwa regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pengaruh faktor regulasi, komitmen, SDM, dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terlihat juga masih rendah, hal ini terbukti dari adanya penyelesaian proses penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Faktor yang diduga sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dibedakan atas faktor yang bisa dikendalikan oleh pemerintah dan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah. Faktor yang bisa dikendalikan adalah Komitmen, SDM, dan Perangkat pendukung. Sedangkan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah Regulasi yaitu perubahan peraturan yang terjadi begitu cepat.

Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

1. Regulasi

Regulasi adalah "mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan." Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma). Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

Regulasi adalah persepsi responden tentang perubahan peraturan, keputusan dan perundang-undangan dalam waktu yang singkat, dan perubahan tersebut sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya. Seringnya terjadi perubahan peraturan membuat para pegawai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

2. Komitmen

Menurut Herris B. Simandjuntak (2005: 1) komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Ada dua pendekatan utama dalam melakukan studi komitmen yang diterangkan dalam riset komitmen (Savolander, 1998) pertama pendekatan perilaku (*behavioral approach*) yang memfokuskan pada perilaku yang terkait dengan komitmen (dimanifestasikan dengan tindakan). Kedua pendekatan sikap (*attitudinal approach*) yang ditujukan pada identifikasi individu dengan organisasi dan sasarannya (dimanifestasikan dalam pendapat dan kepercayaan). Luthans (2006: 249) menyatakan bahwa, komitmen organisasi paling sering diartikan sebagai "keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan

penerimaan nilai dari tujuan organisasi". Pada Pemerintah Daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat Pemerintah Daerah dalam meriyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung-jawab terhadap penyusunan anggaran tersebut. Secara substansi, istilah komitmen satat dengan nilai dan sasaran. Istilah tersebut mengandung makna sebuah proses bagaimana nilai dan sasaran tersebut tercapai atau dengan kata lain komitmen merupakan syarat sebuah keberhasilan. Dalam kaitan dengan penelitian ini, komitmen dipandang sebagai suatu keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap keberhasilan penerapan peraturan baru.

3. Sumber Daya Manusia

Menurut R. Matindas (2002: 89) Sumber Daya Manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan dengan lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Wiley (2002: 3) mendefinisikan bahwa "SDM merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut". Menurut Susilo (2002: 3) "sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya". Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Namun, pelaksanaannya, kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, ada dua hal yang diperhatikan dalam sumber daya manusia, yaitu :

- a. Persaingan dalam sumber daya manusia sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setiap organisasi. Baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas SDM ini diukur dari

kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Pengetahuan disini dimaksudkan dalam arti luas yaitu kemampuan SDM yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari perilaku kerjanya yang kompeten, cepat, dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar.

- b. Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang – orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah dengan menggunakan semua bakat yang dimiliki sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi diluar organisasi mereka.

Katz dan Khan (1966, dalam Steers, 1985: 135) mengharuskan organisasi berusaha memenuhi tiga persyaratan penting agar mampu memastikan keberhasilan akhir, yaitu; pertama, setiap organisasi harus mampu membina dan mempertahankan suatu armada kerja yang mantap yang terdiri dari pekerja pria dan wanita yang trampil. Selain perekutannya yang terseleksi, juga harus disesuaikan pengelarannya serta imbalan yang dapat memenuhi kebutuhan individu. Kedua, organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan daripada pekerjaannya. Setiap pegawai dituntut untuk bersedia berkarya, tetapi juga melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab utamanya secara profesional. Ketiga, para pegawai harus mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inovatif. Selain menurut pembagian tugas, juga personil, tidak pasif melainkan juga harus berinisiatif. SDM diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh responden, pemahaman tentang tugasnya, kesiapan dalam melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah daerah perlu memiliki kualitas sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang relevan.

4. Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, *software* dan lain-lain.

Menurut Mulyono (2007), perangkat keras adalah peralatan komputer yang dapat dilihat oleh mata atau diraba. Untuk sati unit komputer mikro, peralatan tersebut terdiri dari:

- a. monitor (*Video Display Unit*), yaitu suatu alat yang berfungsi untuk memperlihatkan semua yang telah dikerjakan dengan papan ketik,
- b. unit sistem (*System Unit*) atau unit pemroses pusat (*central processing unit*), yaitu rumah dari komponen-komponen komputer yang berupa chip-chip elektronika,
- c. papan ketik (*key board*), yaitu tombol huruf dan tombol angka yang bentuknya hampir mirip dengan papan ketik mesin tulis manual maupun elektronika,
- d. disket (*diskette*), yaitu media tempat menyimpan teks atau perangkat lunak yang dipergunakan,
- e. pemutar Disk (*Disk drive*), biasanya terdiri dari 2, 4 bahkan beberapa komputer memiliki 8. letaknya dapat menjadi satu dengan unit sistem atau terpisah,
- f. pencetak (*printer*) atau lebih dikenal dengan printer.

Menurut Mulyono (2007), "Perangkat lunak atau software adalah perangkat lunak yang meliputi perintah – perintah atau instruksi – instruksi yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya". Perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Program komputer yaitu digunakan untuk memerintah komputer melaksanakan langkah – langkah yang tertulis di program,
- b. Program dokumentasi yaitu catatan – catatan atas program yang digunakan untuk menjelaskan langkah atau prosedur program tersebut, dan semua catatan – catatan yang berkaitan dengan proses data tersebut.

Perangkat pendukung ini diukur berdasarkan ketersediaan perangkat pendukung dan kemutakhirananya.

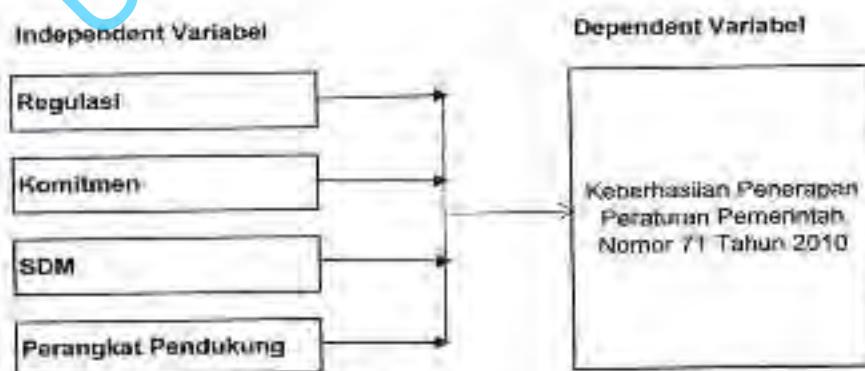
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan dilingkup pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah jika menurut peraturan perundang – undangan organisasi dimaksud menyajikan laporan keuangan. Pernyataan – pernyataan yang terdapat didalam Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 adalah :

- Neraca (*Statement of Financial Position*);
- Laporan Kinerja Keuangan (*Statement of Financial Performance*);
- Laporan Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuivalas (*Statement of Changes In Net Assets/Equity*);
- Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*); dan
- Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan (*Accounting Policies and Notes to The Financial Statements*).

E. Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 4.1. Kerangka Penelitian

Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Y) diperkirakan secara langsung dipengaruhi oleh beberapa variabel independen (X) yaitu Regulasi (X₁), Komitmen (X₂), Sumber Daya Manusia (X₃) dan Perangkat Pendukung (X₄) dengan uraian sebagai berikut:

1. Semakin cepat/lambat regulasi, maka semakin cepat/lambat keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
2. Semakin tinggi/rendah komitmen, maka semakin tinggi/rendah keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
3. Semakin tinggi/rendah SDM, maka semakin tinggi/rendah keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
4. Semakin baik/jelek sarana pendukung, maka semakin baik/jelek keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat (Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual) dengan satu atau lebih variabel bebas (regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung). Apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu, disebut sebagai regresi linier sederhana, sedangkan apabila terdapat lebih dari 1 variabel bebas, disebut sebagai regresi linier berganda.

Analisis regresi setidak-tidaknya memiliki 3 kegunaan, yaitu untuk tujuan deskripsi dari fenomena data atau kasus yang sedang diteliti, untuk tujuan kontrol, serta untuk tujuan prediksi. Regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifatnya numerik. Regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian (kontrol) terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Selain itu, model regresi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi untuk variabel terikat.

Dalam kerangka penelitian perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut Lubis dan Syahputra (2008) kerangka penelitian adalah gambaran ringkas, lugas dan bermas mengenai

keterkaitan satu konsep dengan konsep lainnya yang akan diteliti atau menggambarkan pengaruh atau hubungan antara satu kejadian/fenomena dengan kejadian/fenomena lainnya.

Dengan demikian maka kerangka penelitian ini adalah keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dipengaruhi oleh regulasi, komitmen, Sumber Daya Manusia, dan perangkat pendukung sebagai variabel independen.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dimana yang akan diteliti adalah pengaruh regulasi, komitmen, Sumber Daya Manusia dan perangkat pendukung terhadap pengelolaan laporan keuangan berbasis akrual, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

F. Hipotesis

Margono (2004: 80) menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hipo (*hypo*) dan tesis (*thesis*). Hipo berarti kurang dari, sedang tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau diturunkan (*deduced*) dari teori yang telah ada.

Pada bagian lain, Margono (2004: 67) pun mengungkapkan pengertian lainnya tentang hipotesis. Ia menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Di dalam hipotesis itu terkandung suatu ramalan. Ketepatan ramalan itu tentu tergantung

pada penguasaan peneliti itu atas ketepatan landasan teoritis dan generalisasi yang telah dibacakan pada sumber-sumber acuan ketika melakukan telaah pustaka.

Mengenai pengertian hipotesis ini, Nazir (2005: 151) menyatakan bahwa hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, yang kebenarannya harus diujicobakan secara empiris. Menurutnya, hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.

Trelease (Nazir, 2005: 151) memberikan definisi hipotesis sebagai "suatu keterangan sementara sebagai suatu fakta yang dapat diamati". Sedangkan Good dan Scates (Nazir, 2005: 151) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya. Kerlinger (Nazir, 2005: 151) menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah selalu berubah-ubah. Awalnya pada Tahun 1980 pengelolaan keuangan daerah menggunakan Manual Keuangan Daerah (Makuda), kemudian pada Tahun 2005 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas menuju Akrual, baru saja diterbitkan dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kecuali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tetapi keputusan yang baru tersebut belum begitu dipahami kemudian keluar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Perubahan peraturan yang begitu cepat diduga akan mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan peraturan tersebut. Dengan kata lain regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah akan mempengaruhi keberhasilan penerapan peraturan tersebut.

Maka hipotesis penelitian ini adalah semakin baik regulasi, maka akan semakin baik pula penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Usman, 2010). Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi.

Maka hipotesis penelitian ini adalah semakin tinggi komitmen, maka akan semakin tinggi pula keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Khusus dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tuntutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2007 dimana setiap SKPD harus menyusun laporan keuangannya masing-masing.

Maka hipotesis penelitian ini adalah semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin tinggi juga kualitas pengelolaan keuangan akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisan dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, agar sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berjalan secara efektif maka diperlukan perangkat pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

Maka hipotesis penelitian ini adalah semakin canggih perangkat pendukung, maka akan semakin cepat pula hasil dari laporan keuangan sesuai

dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akraai.

G. Penelitian Terdahulu

Kegunaan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga bisa dijadikan sebagai studi pembanding untuk penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Warisno (2009) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan variabel independen adalah kualitas SDM, komunikasi, sarana pendukung dan komitmen organisasi dan variabel dependen adalah kinerja SKPD. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan kualitas SDM, komunikasi, sarana pendukung dan komitmen organisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Tetapi secara parsial hanya kualitas SDM dan komunikasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD, sedangkan variabel sarana pendukung dan komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Benar Baik Sembiring (2009) berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten Karo). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi yang tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja. Secara parsial penyempurnaan sistem administrasi, penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi yang tegas berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja, tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap APBD berbasis kinerja adalah penyempurnaan sistem administrasi.
3. Pntu Sunarcaya (2008) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Nusa

Tenggara Timur, dengan variabel independen yaitu kepemimpinan, komunikasi, iklim organisasi dan motivasi kerja, sedangkan variabel dependen adalah kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, komunikasi dan iklim organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja adalah motivasi kerja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrida Fitrie (2008) berjudul Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Binjai belum mencerminkan sepenuhnya aspirasi masyarakat daerah di mana arah dan kebijakan umum anggaran lebih di dominasi oleh kepentingan elit lokal diatasnya serta belum optimalnya peranan panitia anggaran DPRD Kota Binjai sebagai wakil rakyat daerah.
5. Azhar (2007) telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan variabel independen adalah komitmen organisasi, sumber daya manusia, perangkat pendukung serta regulasi, sedangkan variabel dependennya adalah keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan komitmen organisasi, sumber daya manusia, perangkat pendukung dan regulasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sementara secara parsial, regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
6. Iuasikal (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja satuan pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku), dengan variabel independen adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen adalah kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan baik secara simultan maupun parsial pemahaman mengenai

sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. artinya bila pengelolaan keuangan daerah dikelola sesuai mekanisme yang berlaku dan didukung oleh peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah maka dapat mendorong kinerja masing-masing satuan kerja pemerintah daerah.

- Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmat Nugroho (2006) berjudul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang Bandung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi telah terbukti sebagai variabel moderasi antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di daerah penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) (konvensional) Cabang Bandung.

Adapun deskripsi beberapa hasil penelitian terdahulu, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sehingga dapat dibandingkan pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Apakah variabel-variabel tersebut memiliki kesamaan atau mungkin terdapat perbedaan satu dengan yang lain.

Hasil- hasil penelitian terdahulu secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Penelitian Tahun	Judul penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Wardha (2009)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Independen variabel adalah Kualitas SDM, Komunikasi, Sarana Pendukung dan Komitmen Organisasi. Sedangkan Dependens variabel berpengaruh terhadap Kinerja SKPD.	Hasil penelitian Kualitas SDM, Komunikasi, Sarana Pendukung, dan Komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Tempi secara parsial hanya kualitas SDM dan Komunikasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD.
2.	Beara Baiq Sembiring (2009)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan	Independen variabel adalah komitmen dari seluruh organisasi,	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen dari seluruh

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten Karo)	penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi. Sedangkan dependen variabel APBD berbasis kinerja.	koespondensi organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi yang tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja. Secara parsial penyempurnaan sistem administrasi, penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi yang tegas berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja, tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap APBD berbasis kinerja adalah perbaikan sistem administrasi.
1.	Petru Sunarsaya (2008)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aitar Nusa Tenggara Timur	Variabel independen ialah kepemimpinan, komunikasi, iklim organisasi dan motivasi kerja, sedangkan variabel dependen kinerja pegawai	Kepemimpinan, komunikasi dan iklim organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja adalah motivasi kerja.
4.	Syafriadi Fitrie (2008)	Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permen dagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai	Perbedaan tunggal antara pengelolaan keuangan daerah berdasarkan proses perencanaan, pelaksanaan / implementasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Binjai belum mencerminkan sepelemanya aspirasi masyarakat daerah di mana arah dan kebijakan umum anggaran lebih di dominasi oleh kepentingan elit lokal diatasnya serta belum optimalnya peranan partisipasi anggaran DPRD Kota Binjai sebagai wakil rakyat daerah.
5.	Azhar (2007)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh	Independen variabel ialah komitmen, SDM, Perangkat Pendukung dan Regulasi. Sedangkan Dependn variabel keberhasilan Permendagri 13 Tahun 2006.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, sumber daya manusia bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan.

6.	Aksan Tuasikal (2007)	Pengaruh Pernahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kab. Maluku Tengah di Provinsi Maluku)	Variabel independen ialah pernahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan dependen variabel kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.	Baik secara simultan maupun parsial pernahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah.
7.	Rakhmat Nugroho (2006)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang Bandung)	Independen variabel ialah kepemimpinan <i>(transformational)</i> , budaya organisasi, budaya organisasi merupakan variabel moderating yang mempengaruhi hubungan kepemimpinan. Sedangkan dependen variabel kinerja karyawan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi telah terbukti sebagai variabel moderasi antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di daerah penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) (konvensional) Cabang Bandung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

I. Populasi

Dalam penelitian biasanya akan dilakukan survei terhadap sebuah himpunan secara menyeluruh. Kesimpulan sampel dari himpunan tersebut dibuat elemen yang disebut populasi. Spesifikasi lengkap dari populasi adalah langkah penting dalam peluang sampling. Oleh karena itu secara umum populasi dapat didefinisikan sebagai *sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena*. Agusyana dan Islandscript (2011: 23-24).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2009: 81). Menurut Simamora (2004), populasi adalah sekumpulan satuan analisis yang didalamnya terkandung informasi yang ingin diketahui. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dilibatkan dalam penelitian, melalui sampel diharapkan peneliti mengetahui informasi tentang populasi.

Rancangan (desain) penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausal. Biasanya desain kausal juga disebut dengan hubungan sebab akibat. Desain kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara tiga variabel atau lebih (Sugiyono, 2004: 11) Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana masing-masing SKPD diwakili oleh satu orang pejabat penatausahaan keuangan. Ketiga puluh lima PPK SKPD yang akan diteliti ini terdiri dari 4 PPK SKPD Sekretariat yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan Sekretariat Bakorluh P2K, 16 PPK SKPD Dinas, 11 PPK SKPD Badan, 2 PPK SKPD Kantor, 1 PPK SKPD Rumah Sakit dan 1 PPK Inspektorat. Dengan demikian jumlah pejabat yang menjadi populasi penelitian ini sebanyak 35 orang di tambah staf bagian penata laporan keuangan sebanyak 12 orang, total yang menjadi populasi penelitian ini sebanyak 47 orang.

2. Sampel

Sampel dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data yang diambil dari sebuah populasi, Agusyana dan Islandscript (2011: 24). Kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut.

- a. Merupakan kepala seksi/kepala sub bagian yang bertanggung jawab langsung atau memiliki garis komando langsung terhadap kepala SKPD sebagai penanggung jawab utama (berdasarkan tugas dan struktur organisasi) dari seluruh dinas di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (35 dinas),
- b. Responden yang ikut dalam partisipasi penyusunan laporan keuangan dalam dinas tempatnya bekerja sekarang.

Pengertian sampel penelitian menurut Irawan (2004) adalah wakil dari populasi. Dengan mempertimbangkan sedikitnya jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini (35 orang),

penulis berinisiatif untuk menjadikan seluruh pejabat tersebut sebagai sampel penelitian. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2002: 102) bahwa jika jumlah populasi penelitian kurang dari 100 orang, maka sebaiknya diambil semuanya sebagai sampel atau responden penelitian.

Menurut Irawan (2004), prosedur penelitian sensus adalah jika jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan prosedur penelitian sensus, maka dalam penelitian ini tidak diperlukan teknik khusus untuk mengambil sampel.

8. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian adalah kuesioner. Dalam kuesioner ini terdapat pernyataan-pernyataan penelitian tentang variabel regulasi, komitmen, SDM, perangkat pendukung dan keberhasilan PPK SKPD.

Pada masing-masing pernyataan akan didapatkan sejumlah alternatif jawaban. Alternatif-alternatif jawaban yang ada didalam kuesioner ini merujuk pada Skala Likert. Kuesioner disusun berbasis kepada skala likert, guna mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan dan Sunarto, 2009: 20-21) dengan alternatif jawaban :

1. Sangat setuju disingkat SS dengan kategori nilai 5;
2. Setuju disingkat S dengan kategori nilai 4;
3. Ragu-ragu disingkat RR dengan kategori nilai 3;
4. Tidak setuju disingkat TS dengan kategori nilai 2; dan
5. Sangat tidak setuju disingkat STS dengan kategori nilai 1.

Menurut Riduwan (2003), skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

kejadian atau gejala sosial. Menurut Simamora (2004), skala pengukuran yang digunakan untuk menilai setiap jawaban responder adalah skala Likert, dimana skala ini memberikan peluang kepada respondeh untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan terhadap suatu pernyataan. Pernyataan diberikan berjenjang, mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi. Jawaban-jawaban yang telah diberikan bobot, kemudian dijumlahkan untuk setiap responder, guna dijadikan skor penilaian terhadap variabel-variabel yang diteliti. Adapun pertimbangan digunakan skala Likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Skala Likert memiliki tingkat realibilitas tinggi dan mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu.
2. Skala Likert sangat luwes dan fleksibel daripada teknik pengukuran lainnya.

Seperti yang dikutip Sugiyono dari buku yang ditulis S. Nasution (1987).

Selanjutnya pada masing-masing Skala Likert tersebut diberikan sejumlah bobot atau nilai. Berikut adalah alternatif-alternatif jawaban berdasarkan Skala Likert dan pembobotannya dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Alternatif Jawaban dan Skor

Alternatif Jawaban Skala Likert	Bobot Jawaban Skala Likert
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Tidak Tahu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2009: 94)

C. Prosedur Pengumpulan Data

Setelah membuat instrumen penelitian, maka selanjutnya data-data berupa jawaban kuesioner yang diperoleh dari responden diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Pengumpulan Kuesioner yaitu mengumpulkan seluruh kuesioner yang telah disebarluaskan kepada responden penelitian.
2. Pemeriksaan Kuesioner yaitu memeriksa jawaban-jawaban yang diberikan responden penelitian. Jika terdapat kuesioner yang belum lengkap, maka akan dikembalikan untuk diisi kembali oleh responden tersebut.
3. Proses pengkodean (*coding*). Setelah seluruh jawaban responden diperiksa dan telah dilengkapi atau terisi, maka selanjutnya peneliti melakukan pembobotan pada masing-masing jawaban.
4. *Entry Data* yaitu proses memasukkan jawaban-jawaban kuesioner responden ke dalam computer (*entry data*) setelah data diberikan bobot atau skor jawaban.

D. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui satu tahap yaitu dengan cara memberikan kuisioner yang berisi sejumlah pertanyaan tentang regulasi, komitmen, Sumber Daya Manusia, perangkat pendukung dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kepada 47 responden. Keempat puluh tujuh orang responden ini 35 orang merupakan para Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan 12 orang staf akuntansi dan pelaporan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPPKAD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari 47 kuisioner yang disebarluaskan kepada 35 pejabat PPK, SKPD dan 12 staf akuntansi dan pelaporan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semuanya dikembalikan dengan lengkap. Berikut adalah deskripsi dari kuisioner yang disebarluaskan tersebut.

Tabel 3.2. Distribusi Sebaran Kuisioner Penelitian

Kelompok Responden	Instansi	Jumlah			
		Sebar		Kembali	Tidak
		PPK	Staf	Baik	Rusak
Sekretariat Daerah	1	1	0	1	0
Sekretariat DPRD	1	1	0	1	0
Sekretariat KORPRI	1	1	0	1	0
Sekretariat Bakorluh P2K	1	1	0	1	0
SKPD Dinas	16	16	12	28	0
SKPD Badan	11	11	0	11	0
SKPD Kantor	2	2	0	2	0
SKPD Rumah Sakit	1	1	0	1	0
SKPD Inspektorat	1	1	0	1	0
Jumlah	35	35	12	47	0

E. Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu; (1) *independent variable*, dan (2) *dependent variable*. *Independent variable* dalam penelitian ini adalah variabel regulasi, komitmen, SDM, dan perangkat

pendukung. *Dependent variabel* adalah keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pengukuran masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

1. Regulasi

Regulasi diukur berdasarkan sikap responden tentang perubahan peraturan dalam waktu yang singkat, dan perubahan tersebut sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (sangat sering / sangat memahami / sangat cepat), skor 4 (sering / memahami / cepat), skor 3 (cukup sering / cukup memahami / cukup), skor 2 (tidak sering / tidak memahami / lama) dan skor 1 (sangat tidak sering / sangat tidak memahami / sangat lama).

2. Komitmen

Komitmen diukur berdasarkan sikap dari responden terhadap keinginan untuk melaksanakan tugas dalam hal pengelolaan keuangan daerah walaupun peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah-ubah. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (sangat tinggi), skor 4 (tinggi), skor 3 (cukup), skor 2 (rendah) dan skor 1 (sangat rendah).

3. Sumber Daya Manusia

SDM diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperlukan responden, pemahaman tentang tugasnya, kesiapan dalam melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Variabel ini diukur

dengan skala Likert yaitu mengukur sikap responden dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (sangat relevan / sangat berpengalaman / sangat memahami / sangat banyak), skor 4 (relevan / pengalaman / memahami / banyak), skor 3 (cukup relevan / cukup berpengalaman / cukup), skor 2 (kurang relevan / kurang berpengalaman / kurang memahami / kurang) dan skor 1 (sangat tidak relevan / sangat tidak berpengalaman / sangat tidak memahami / sangat kurang).

4. Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung ini diukur berdasarkan ketersediaan perangkat pendukung dan kemutakhirannya. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (sangat banyak / sangat memadai / sangat canggih), skor 4 (banyak / memadai / canggih), skor 3 (cukup / cukup memadai / cukup canggih), skor 2 (kurang / tidak memadai / tidak canggih) dan skor 1 (sangat kurang / sangat tidak memadai / sangat tidak canggih).

5. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diukur berdasarkan sikap responden terhadap penyelesaian laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional kegiatan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan); keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang

diajukan dengan skor 5 (sangat berhasil), skor 4 (berhasil), skor 3 (cukup berhasil), skor 2 (tidak berhasil) dan skor 1 (sangat tidak berhasil).

Tabel 3.3

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL.

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran variable	Referensi	Skala Penelitian
Dependent Variabel				
Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diukur berdasarkan sikap responden terhadap kinerja / keberhasilan mereka menerapkan peraturan yang baru, misalkan dalam hal menyusun LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Analisa, Laporan Penetapan Ekuitas, Cal.K. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukananya dengan skor 5 (sangat berhasil), skor 4 (berhasil), skor 3 (cukup berhasil), skor 2 (tidak berhasil) dan skor 1 (sangat tidak berhasil).		http://ronawa.jah.wordpress.com/2007/05/29/kinerja-apa itu/	Interval
Independent Variabel				
Regulasi	Regulasi adalah perubahan peraturan, keputusan dan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.	Regulasi diukur berdasarkan sikap responden tentang kecepatan suatu peraturan, keputusan dan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukananya dengan skor 5 (sangat sering / sangat memahami / sangat cepat), skor 4 (sering / memahami / cepat), skor 3 (cukup sering / cukup memahami / cukup), skor 2	http://id.silveo.ng.com/law-and-politics/politics/2094305-pengertian-regulasi/#ixzz1NdJQ1wSH	Interval

		(tidak sering / tidak memahami / lama) dan skor 1 (sangat tidak sering / sangat tidak memahami / sangat lama).		
Komitmen	Komitmen adalah keinginan dari setiap anggota SKPD untuk melaksanakan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundangan.	Komitmen diukur berdasarkan sikap responden terhadap keinginan dan ketidak inginan mereka dalam melakukan perubahan. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (sangat tinggi), skor 4 (tinggi), skor 3 (cukup), skor 2 (rendah) dan skor 1 (sangat rendah).	Shafritz, Russell & Borick (2007: 65)	Interval
SDM	SDM adalah kemampuan dari setiap anggota SKPD dalam melaksanakan tugasnya.	SDM diukur berdasarkan sikap responden terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (sangat relevan / sangat berpengalaman / sangat memahami / sangat banyak), skor 4 (relevan / pengalaman / memahami / banyak), skor 3 (cukup relevan / cukup berpengalaman / cukup), skor 2 (kurang relevan / kurang berpengalaman / kurang memahami / kurang) dan skor 1 (sangat tidak relevan / sangat tidak berpengalaman / sangat tidak memahami / sangat kurang).		Interval
Perangkat Pendukung	Perangkat Pendukung adalah ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya	Perangkat pendukung diukur berdasarkan sikap responden terhadap kecukupan perangkat pendukung tersebut dalam membantu tugas mereka. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (sangat banyak)		Interval

	komputer dan software yang berkaitan dengan kebutuhan mereka	/ sangat memadai / sangat canggih), skor 4 (banyak / memadai / canggih), skor 3 (cukup / cukup memadai / cukup canggih), skor 2 (kurang / tidak memadai / tidak canggih) dan skor 1 (sangat kurang / sangat tidak memadai / sangat tidak canggih).		
--	--	--	--	--

F. Uji Reliabilitas dan Validitas

Sebelum dilakukan analisis data, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap validitas instrumen penelitian dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Apakah pernyataan-pernyataan dari instrumen penelitian sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai?. Di sisi lain, adalah pengujian reliabilitas, yang ditujukan untuk melihat sejauhmana tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dari instrumen penelitian tersebut. Walaupun sebenarnya menurut Ancok (1989:122) masih ada faktor-faktor lain, seperti pewawancara dan responden yang juga dapat menjadi sumber rendahnya validitas dan reliabilitas data. Namun didalam penelitian ini, pengujian validitas dan reliabilitas ini hanya ditujukan kepada kesalahan-kesalahan (*errors*) yang disebabkan oleh instrumen penelitian saja. Dengan adanya pengujian terhadap validitas dan reliabilitas, diharapkan hasil penelitian yang valid dan reliabel dengan instrumen penelitian yang valid dan reliabel juga. Hasil penelitian dikatakan valid berarti instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur dan dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesuanggunnya terjadi pada objek yang diteliti, dan hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2010: 348).

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*. suatu instrumen dikatakan reliable jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 (Nunnally, 1967: 120).

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Ancok, 1998: 120). Hakim (1999) mengemukakan :

"Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner".

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut valid.
2. Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
3. r hitung dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*.

G. Uji Normalitas

Tujuan Uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell Shaped*). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal.

Pedoman pengambilan keputusan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari :

1. Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal.
2. Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal.

Selain melihat nilai signifikan dari uji Kolmogorov Smirnov, untuk melihat apakah suatu data mempunyai distribusi normal dapat dilihat dari nilai Z skewness dan dengan melihat grafik. Pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik.

II. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka model penelitian dapat dibuat sebagai berikut:

$$\text{Keberhasilan} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Regulasi} + \beta_2 \text{ Komitmen} + \beta_3 \text{ SDM} + \beta_4 \text{ Perangkat Pendukung} + e$$

Dimana :

β_0 = Konstanta
 β_1 = Koefisien regresi regulasi
 β_2 = Koefisien regresi Komitmen
 β_3 = Koefisien regresi SDM
 β_4 = Koefisien regresi Perangkat Pendukung
 e = Tingkat kesalahan penggantian

I. Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependent. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of Variance (ANOVA)*.

Pengujian ANOVA atau Uji F bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi atau dengan membandingkan F hitung dengan F Tabel. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada Tabel ANOVA $< \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada Tabel ANOVA $> \alpha 0,05$, maka H_0 diterima (tidak berpengaruh).

Pengujian dengan membandingkan F hitung dengan F Tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila $F_{hitung} > F_{Tabel} (\alpha 0,05)$ maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{Tabel} (\alpha 0,05)$ maka H_0 diterima (tidak berpengaruh). Adapun F Tabel dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan (α) dan derajat bebas (*degree of freedom*).

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

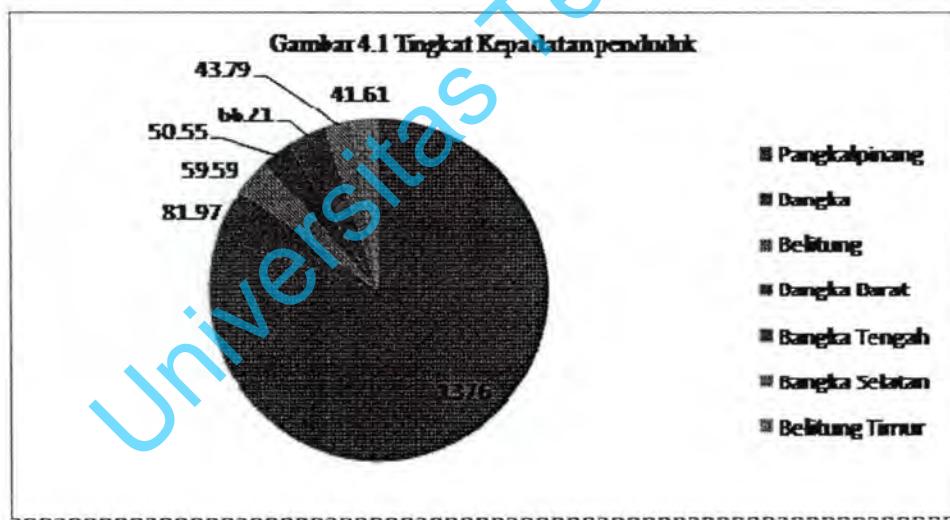
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari enam (6) Kabupaten, yakni: Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, dan satu (1) Kota, yakni Kota Pangkalpinang. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada $104^{\circ}50'$ sampai $109^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}50'$ sampai $04^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Barat dengan Daratan Timur Sumatera Selatan
- b. Sebelah Timur dengan Selat Karimata
- c. Sebelah Utara dengan Selat Natuna
- d. Sebelah Selatan dengan laut Jawa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari wilayah daratan dan lautan dengan luas seluruhnya $81.724,54\text{ Km}^2$. Luas wilayah daratan adalah $16.429,64\text{ Km}^2$ atau 20, 10 % dari luas keseluruhan, sedangkan luas wilayah lautan lebih kurang $65.301,00\text{ Km}^2$ atau 79, 90% dari total wilayah seluruhnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas dua pulau besar, yakni pulau Bangka dan pulau Belitung serta pulau-pulau kecil lainnya.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pemutakhiran data tahun 2009 adalah sebanyak 1.084.523 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka belitung memiliki kontribusi yang cukup berarti dalam pertambahan penduduk secara nasional. Jumlah penduduk tersebut secara umum terdiri atas laki-laki sebanyak 80.146 jiwa dan perempuan 80.088 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata 66 jiwa/Km² dari jumlah keseluruhan penduduk 1.084.523 jiwa dibandingkan dengan luas wilayah. Adapun tingkat kepadatan penduduk pada masing-masing kabupaten/kota di Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan lebih spesifik diatur melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan yang sangat mendasar, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bergesernya fungsi *ordonancing* dari Badan/Bagian/Biro Keuangan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPD sebagai *accounting entity* yang berkewajiban membuat laporan keuangan SKPD. Konsekuensi dari perubahan ini adalah dilimpakkannya kewenangan yang lebih luas dan otonom kepada Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran dan sekaligus tuntutan agar pengguna anggaran menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) sebagai pengembangan fungsi *ordonancing* merupakan jabatan

yang strategis dan menentukan baik buruknya pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) menjadi filter atas keabsahan pengeluaran atas beban APBD, sekaligus bertanggungjawab atas fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan ditingkat SKPD. Penyiapan pejabat yang akan ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) menjadi sangat penting dan mendesak untuk menuju ke arah tata kelola keuangan daerah yang baik berdasarkan kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) yang mempunyai tugas:

- (a) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK;
- (b) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluran;
- (c) Melakukan verifikasi SPP;
- (d) Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (e) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- (f) Melaksanakan akuntansi SKPD dan
- (g) Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) adalah:

- a) Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubbag Keuangan pada SKPD;
- b) Memiliki integritas yang tinggi;
- c) Mengerti dan memahami peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan jabatan fungsional yang dipegang oleh kasubbag keuangan atau kasubbag lainnya yang sejenis, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pungutan penerimaan daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan /atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terkait dalam kerangka pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01 point 14 disebutkan bahwa komponen-komponen Laporan Keuangan Pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Fungsi Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5. Ekonomi Makro

Sinkronisasi dan pemantapan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan guna mempertajam pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk menjabarkan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihannya.

Perumusan aspek legalitas, aspek teknis dan aspek material dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dirumuskan secara cermat agar di kemudian hari tidak mengeliminir kesepakatan proses politik anggaran yang telah dicapai sebagai perwujudan demokrasi yang sudah terbangun di daerah dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tidak akan menimbulkan permasalahan apabila aspek-aspek yang dievaluasi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Tercapainya keserasian antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- c. Tercapainya efisiensi dan efektifitas, kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi urusan wajibnya dan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi perekonomian daerah melalui berbagai aktifitas.

Pembaharuan sistem pengelolaan keuangan daerah membawa perubahan paradigmatis di bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang penatausahaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembaharuan penataan pemberian kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk memperjelas adanya tanggungjawab dan pemisahan wewenang antara yang memerintah, memeriksa dan melakukan

tindakan pengeluaran harus dilakukan sejalan dengan prinsip akuntabilitas atau tanggungjawab pengelolaan keuangan negara dan daerah. Selanjutnya penataan sistem dan prosedur dan penyiapan kelengkapan instrumen administrasi anggaran baik pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk pengendalian manajemen kas, perlu dilakukan mengingat unsur-unsur ini sangat menentukan tercapainya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Di bidang pelaksanaan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan upaya untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat menyajikan informasi yang handal, lengkap, akurat, tepat waktu dan mudah dimengerti serta dapat diperbandingkan sehingga bermanfaat bagi Kepala Daerah dalam rangka pengambilan keputusan dimana untuk itu penatausahaan keuangan daerah merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kualitas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat bergantung pada apa yang dihasilkan oleh SKPD sebagai Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, para kepala SKPD, PPK SKPD, dan Bendahara mempunyai peranan yang sangat besar. Selain itu, perlu juga diciptakan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjunjung tinggi asas, norma dan disiplin anggaran serta membangun instrumen operasional yang mampu mengeliminasi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan

daerah. Untuk itu, para pengelola keuangan daerah diharapkan tetap menjaga integritas dan profesionalismenya melalui berbagai langkah seperti tertib administrasi, taat asas, taat tujuan, taat wewenang dan taat aturan maupun mematuhi hukum-hukum administrasi keuangan.

B. Pengujian Validitas dan Reabilitas Data terhadap Faktor Regulasi, Komitmen, SDM, Perangkat Pendukung, dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012

Ketepatan hasil dari sebuah pengujian dalam penelitian tergantung dari instrumen penelitian yang digunakan, sedangkan analisis statistika yang digunakan tergantung dari skala pengukuran data yang digunakan. Oleh karena itu instrumen penelitian harus benar-benar memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas.

Sebuah instrumen dikatakan valid atau sahif jika instrumen tersebut mampu mengukur apa yang akan diukur, sedangkan instrumen yang memenuhi persyaratan reliabilitas atau handal, jika instrumen tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten walaupun instrumen tersebut digunakan untuk mengukur berkali-kali. Untuk mendapat sebuah instrumen penelitian yang valid dan reliabel, baik untuk variabel kuantitatif maupun kualitatif, maka harus dilakukan uji coba terhadap instrumen tersebut sebelum instrumen ini digunakan terhadap seluruh responden dari penelitian.

Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan terhadap 47 orang responden penata laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kuesioner yang berisikan pernyataan tentang regulasi,

komitmen, Sumber Daya Manusia, perangkat pendukung, dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan bantuan SPSS Ver 16.0 dan diperoleh hasil seperti tampak pada Lampiran 2. Hasil analisis data berupa angka korelasi (r_{hitung}) yang kemudian dibandingkan dengan r_{Tabel} , dimana r_{Tabel} untuk responden sebanyak 47 orang ($n=47$) adalah sebesar 0,288. Suatu pernyataan yang mewakili faktor-faktor yang diteliti dikatakan valid jika nilai $r_{hitung} \geq 0,288$ dan jika nilai $r_{hitung} < 0,288$ maka butir pernyataan tersebut tidak valid.

1. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor Regulasi

Kolom *Corrected Item – Total Correlation* merupakan korelasi antara skor item dengan total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Untuk menguji validitas, butir pertanyaan tersebut harus dibandingkan dengan r_{Tabel} pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan pada signifikansi 5% dengan derajat bebas $df = 29$, r_{Tabel} sebesar 0,288.

Berikut adalah hasil pengujian validitas terhadap faktor regulasi.

**Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Regulasi (X1)**

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item – Total Correlation	Keputusan	Cronbach's Alpha
Regulasi (X1)	1	.668	Valid	.738
	2	.444	Valid	
	3	.589	Valid	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

Catatan: $r_{Tabel} = 0,288$

Berdasarkan pada Tabel 4.1 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan tiga pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{Tabel}$ pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil ini maka item pertanyaan variabel regulasi dapat disimpulkan lolos uji validitas, sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada

pengujian reabilitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,738, berdasarkan hasil uji ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuisioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Karena hasil uji semua item adalah reliabel berarti instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian.

2. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor Komitmen

Tabel 4.2 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan komitmen.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Komitmen (X2)

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item - Total Correlation	Keputusan	Cronbach's Alpha
Komitmen (X2)	1	.749	Valid	.853
	2	.749	Valid	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

Catatan: $r_{Tabel} = 0.288$

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.2, setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r_{Tabel} . Berdasarkan hasil ini maka item pertanyaan variabel komitmen dapat disimpulkan lolos uji validitas, sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada pengujian reabilitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,853, berdasarkan hasil uji ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuisioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Karena hasil uji semua item adalah reliabel berarti instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian.

3. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor SDM

Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan SDM.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel SDM (X3)

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item – Total Correlation	Keputusan	Cronbach's Alpha
SDM	1	.515	Valid	.680
(X3)	2	.389	Valid	
	3	.493	Valid	
	4	.458	Valid	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

Catatan: r Tabel = 0.288

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.3 diatas, setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r Tabel. Berdasarkan hasil ini maka item pertanyaan variabel SDM dapat disimpulkan lolos uji validitas, sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada pengujian reabilitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,680, berdasarkan hasil uji ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan keusioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Karena hasil uji semua item adalah reliabel berarti instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian.

4. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor Perangkat Pendukung

Tabel 4.4 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan Perangkat Pendukung.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Perangkat Pendukung (X4)

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item – Total Correlation	Keputusan	Cronbach 's Alpha
Perangkat Pendukung (X4)	1	.555	Valid	.663
	2	.635	Valid	
	3	.452	Valid	
	4	.164	Tidak Valid	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

Catatan: $r_{Tabel} = 0.288$

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.4, setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r_{Tabel} , kecuali pada item pertanyaan ke-4. Berdasarkan hasil ini maka pengujian dilakukan ulang dengan mengeluarkan item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid pada pengujian pertama. Hasil pengujian kedua disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji ke-2 Validitas Item Pertanyaan Variabel Perangkat Pendukung (X4)

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item – Total Correlation	Keputusan	Cronbach 's Alpha
Perangkat Pendukung (X4)	1	.671	Valid	.745
	2	.582	Valid	
	3	.479	Valid	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

Catatan: $r_{Tabel} = 0.288$

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.5, setiap item pertanyaan pada pengujian ke-2 menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r_{Tabel} . Berdasarkan hasil ini maka item pertanyaan variabel perangkat pendukung dapat disimpulkan lolos uji validitas, sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada pengujian reabilitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner menghasilkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,745, berdasarkan hasil uji ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuisioner

sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Karena hasil uji semua item adalah reliabel berarti instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian.

5. Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Faktor Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tabel 4.6 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Y)

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item – Total Correlation	Keputusan	Cronbach 's Alpha
Penerapan PP Nomor 71	1	.517	Valid	.680
(Y)	2	.517	Valid	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

Catatan: $r_{Tabel} = 0.288$

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.6, setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r_{Tabel} . Berdasarkan hasil ini maka item pertanyaan variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat disimpulkan lolos uji validitas, sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada pengujian reabilitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,680, berdasarkan hasil uji ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuisisioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Karena hasil uji semua item adalah reliabel berarti instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian.

C. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel yang diuji mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dapat digunakan dengan grafik histogram dan *normal probability plot*. Menurut central limit theorem, asumsi normalitas akan terpenuhi apabila jumlah sampel yang digunakan lebih dari satu sama dengan 25 (Mendenhall dan Beaver, 1992: 64). Untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram, maka dapat dilakukan dengan melihat antara data riil atau nyata dengan kurva yang terbentuk. Apabila grafik yang terbentuk oleh data riil atau nyata ini terbentuk mengikuti kurva, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji data statistik dengan model *Kolmogorov-smirnov* dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah terdistrbusi normal atau tidak. Berikut ini adalah hasil dari uji normalitas yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan SPSS.

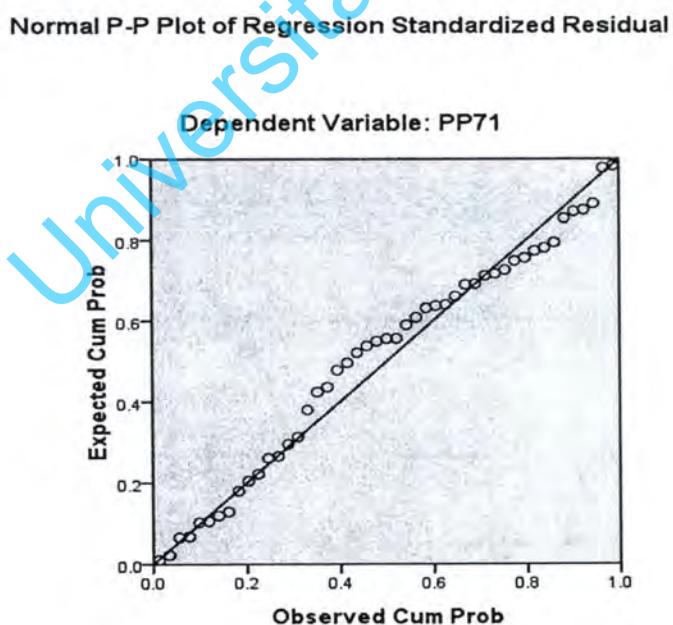
Tabel 4.7
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		residual
N		47
Normal Parameters ^a	Mean	6.5319
	Std. Deviation	1.08185
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.079
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.567
Asymp. Sig. (2-tailed)		.905
a. Test distribution is Normal.		
Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0		

Berdasarkan hasil uji statistik dengan model *Kolmogorov-Smirnov* seperti yang terdapat dalam Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah $0,905 > 0,05$.

Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dapat juga dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya.

Pada penelitian hasil pengolahan data menampilkan grafik normal, plot yang ada menunjukkan titik menyebar sekitar garis diagonal, serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal, demikian juga dengan garis histogram memberikan pola distribusi normal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berdasarkan masukan variabel independennya (regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung).



Gambar 4.2

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.

D. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan linier diantara variabel independent dalam model regresi. Multikolinearitas menyebabkan timbulnya masalah-masalah, dimana kefisien regresi yang bertanda positif dalam regresi sederhana bisa berubah negatif dalam regresi berganda atau sebaliknya, fluktuasi nilai estimasi koefisien regresi sangat besar, dan jika variabel-variabel independent terkorelasi satu sama lain, variabel-variabel tersebut menjelaskan varian yang sama dalam mengestimasi variabel dependen, jadi penambahan variabel independent tidak berpengaruh apa-apa. Metode pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat nilai *Variance Inflation Float* (VIF) pada model regresi. Jika VIF di bawah 2, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.8

Tabel 4.8
Hasil Uji Coefficiens Model

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Regulasi	.613	1.632
Komitmen	.810	1.235
Sdm	.616	1.622
Perangkat	.934	1.070

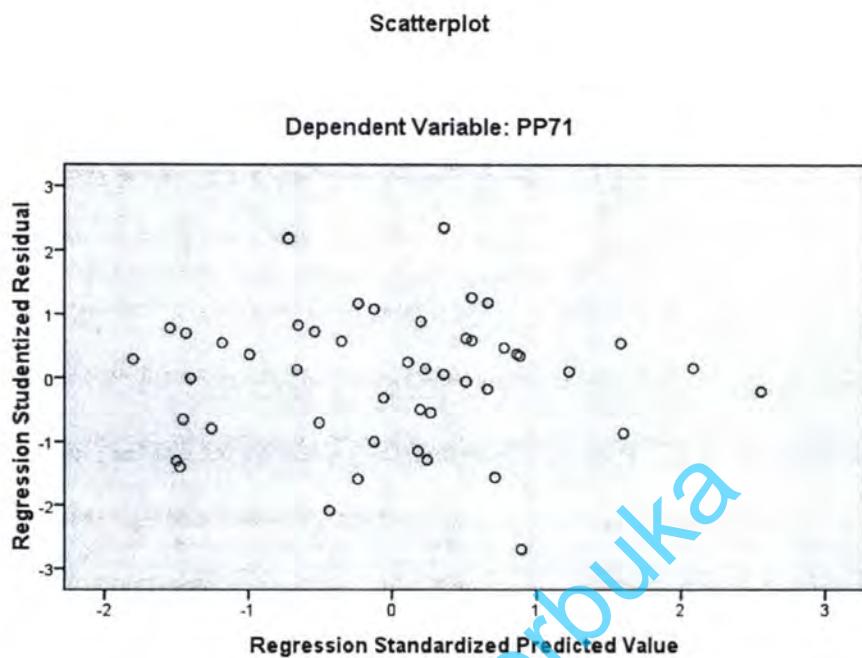
Dari Tabel 4.8 hasil uji *coefficients model*, terlihat bahwa nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 2 dan *Tolerance* adalah di sekitar angka 1 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini berarti bahwa variabel regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung tidak terdapat korelasi dan model regresi ini dapat dinyatakan baik. Dengan demikian model garis regresi berganda yang digunakan untuk variabel bebas Regulasi (X1), Komitmen (X2), SDM (X3), dan Perangkat pendukung (X4) terhadap variabel terikat Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (Y) tepat digunakan.

E. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Dasar analisisnya adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang menumpuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Grafik *scatterplot* dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini.



Gambar 4.3

Dari grafik *scatterplot* pada Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa titik data menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

F. Hasil Pengujian Hipotesis Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

1. Uji Signifikan Simultan (Uji – F) Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel regulasi (X1), variabel komitmen (X2), variabel sumber daya manusia (X3) dan variabel perangkat pendukung (X4), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Y).

Nilai F hitung diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Uji F - Hitung
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	53.838	4	13.460	5.776	.001 ^a
Residual	97.864	42	2.330		
Total	151.702	46			

a. Predictors: (Constant), perangkat, regulasi, komitmen, sdm

b. Dependent Variable: PP71

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

Dari Tabel 4.9 (ANOVA) diperoleh nilai $F = 5,776$ dengan nilai $Sig. = 0,001 < 0,05$. H_0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, atau dengan kata lain variabel regulasi (X1), variabel komitmen (X2), variabel SDM (X3) dan variabel perangkat pendukung (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji – t) Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Uji parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas X benar-benar memberikan kontribusi terhadap variabel terikat Y. Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah, suatu variabel

regulasi (X1), variabel komitmen (X2), variabel sumber daya manusia (X3) dan variabel perangkat pendukung (X4) masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Y).

Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Uji t - Hitung
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.882	1.860		2.087	.043		
Regulasi	.213	.097	.347	2.191	.034	.613	1.632
komitmen	-.042	.124	-.047	-.338	.737	.810	1.235
Sdm	.170	.085	.314	1.990	.053	.616	1.622
perangkat	-.120	.096	-.161	-1.255	.217	.934	1.070

a. Dependent Variable: PP71

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

a. Signifikansi Variabel Konstanta

Signifikansi variabel konstanta; sig. = 0,043 < 0,05 ini menunjukkan bahwa konstanta mempengaruhi secara signifikan dalam regresi ganda.

b. Signifikansi Variabel Regulasi

Signifikansi variabel regulasi; sig. = 0,034 < 0,05 ini menunjukkan bahwa variabel regulasi mempengaruhi secara signifikan dalam regresi ganda.

c. Signifikansi Variabel Komitmen

Signifikansi variabel komitmen; sig. = 0,733 > 0,05 ini menunjukkan bahwa variabel komitmen tidak mempengaruhi secara signifikan dalam regresi ganda sehingga dapat diabaikan.

d. Signifikansi Variabel Sumber Daya Manusia

Signifikansi variabel sumber daya manusia; sig. = 0,053 < 0,05 ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia mempengaruhi secara signifikan dalam regresi ganda.

e. Signifikansi Variabel Perangkat Pendukung

Signifikansi variabel perangkat pendukung; sig. = 0,217 > 0,05 ini menunjukkan bahwa variabel perangkat pendukung tidak mempengaruhi secara signifikan dalam regresi ganda sehingga dapat diabaikan.

Berdasarkan hasil *print out coefficients^a*, diperoleh nilai *standardized coefficient* 0,347, yang merupakan variabel bebas dengan nilai *standardized coefficient* tertinggi. Dapat disimpulkan bahwa variabel regulasi mempunyai pengaruh dominan ataupun kuat terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3. Koefisien Determinan (R^2) Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Nilai R digunakan untuk melihat berapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,596 yang berarti bahwa

korelasi/hubungan antara regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung dengan keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mempunyai hubungan yang kuat sebesar 59,6%. Dikatakan kuat karena angka tersebut diatas 0,05 atau diatas 50%.

Sedangkan nilai R – Square (R^2) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum R^2 untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan yang mendasar dengan penggunaan R^2 adalah bias terhadap jumlah independen variabel yang dimasukkan dalam model. Setiap ada pertambahan satu independen variabel, maka R^2 pasti meningkat, tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dependen variabel. Oleh karena itu, beberapa peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi (Gozhali: 2003).

Dengan kata lain koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan variabel regulasi (X1), variabel komitmen (X2), variabel sumber daya manusia (X3) dan variabel perangkat pendukung (X4), dapat

menjelaskan variabel keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Tabel 4.11

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics						Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change		
1	.596 ^a	.355	.293	1.52646	.355	5.776	4	42	.001	1.575	

a. Predictors: (Constant), perangkat, regulasi, komitmen, sdm

b. Dependent Variable: PP71

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini menggunakan data Adjusted R². Nilai Adjusted R² sebesar 0,293 yang berarti bahwa variabel dependen (keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) mampu dijelaskan oleh variabel independen (regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung) sebesar 29,3% dan selebihnya (100% - 29,3% = 70,7%) ditentukan oleh faktor lain diluar model penelitian ini. Contoh dari faktor-faktor lain diluar model penelitian ini adalah kebijakan dibuatnya peraturan daerah tentang akuntansi berbasis akrual dengan melibatkan tenaga ahli serta menempatkan tenaga kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kebijakan, tenaga ahli dan latar belakang pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

G. Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Pengaruh Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan metode *enter*, karena metode *enter* seluruh variabel akan dimasukkan ke dalam analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data diolah dengan menggunakan metode enter pada input alat bantu program statistik dan dihasilkan output sebagai berikut yang dapat dilihat pada Tabel 4.12

Tabel 4.12
Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	perangkat, regulasi, komitmen, sdm ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PP71

Sumber: Hasil Penelitian, diolah dengan Program SPSS versi 16.0

Berdasarkan Tabel 4.12 *variables entered/removed^b* menunjukkan analisis statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

1. Variabel yang dimasukkan kedalam persamaan adalah variabel independen yaitu regulasi (X1), komitmen (X2), SDM (X3), dan perangkat pendukung (X4).
2. Tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan (*removed*).
3. Metode yang digunakan untuk memasukkan data yaitu metode *enter*.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,882 + 0,213 - 0,042 + 0,170 - 0,120 + e$$

Dari persamaan diatas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel Independen menunjukkan angka positif, berarti bahwa variabel dependen (keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) mampu dijelaskan oleh variabel independen (regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memperhatikan faktor-faktor lain diluar model penelitian ini yaitu dengan membuat kebijakan peraturan daerah tentang akuntansi berbasis akrual dengan melibatkan tenaga ahli serta menempatkan tenaga kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Koefisien dari variabel Regulasi menunjukkan angka positif, berarti bahwa hubungan antara Regulasi dan keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 positif, yaitu apabila pemerintah daerah membuat peraturan daerah sebagai turunan dari peraturan pemerintah maka akan menaikkan tingkat keberhasilan penerapannya dari peraturan tersebut dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Koefisien dari variabel Komitmen menunjukkan angka negatif, berarti bahwa hubungan antara Komitmen dan keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 negatif, hal ini sesuai dengan logika yang ada dimana semakin sering perubahan dilakukan oleh pemerintah maka akan menurunkan komitmen pegawai untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Koefisien dari variabel Sumber Daya Manusia menunjukkan angka positif, berarti bahwa hubungan antara Sumber Daya Manusia dan keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 positif, hal ini memberi makna bahwa semakin banyak Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka akan semakin besar tingkat keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sedangkan koefisien dari variabel Perangkat Pendukung menunjukkan angka negatif, berarti bahwa hubungan antara Perangkat Pendukung dan keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 negatif, hal ini memberi makna bahwa semakin canggih peralatan pendukung yang modern maka akan semakin rendah tingkat keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal ini dikarenakan perlu pembelajaran dan penyesuaian khusus dari pergantian peralatan pendukung yang tentunya akan memakan waktu untuk melakukan penyesuaianya.

H. Analisis Hasil Penelitian

Analisis pada populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana masing-masing SKPD diwakili oleh satu orang pejabat penatausahaan keuangan. Ketiga puluh lima PPK SKPD yang akan diteliti ini terdiri dari 4 PPK SKPD Sekretariat yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan Sekretariat Bakorluh P2K, 16 PPK SKPD Dinas, 11 PPK SKPD Badan, 2 PPK SKPD Kantor, 1 PPK SKPD Rumah Sakit dan 1 PPK

Inspektorat. Dengan demikian jumlah pejabat yang menjadi populasi penelitian ini sebanyak 35 orang di tambah staf bagian penata laporan keuangan sebanyak 12 orang, total yang menjadi populasi penelitian ini sebanyak 47 orang.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat dilihat bahwa pencarian sampel responden untuk memperoleh informasi tentang pengaruh keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat memenuhi persyaratan data yang akurat, yang mana gambaran responden menunjukkan informasi yang objektif.

Hasil pengujian pada instrumen penelitian menunjukkan bahwa butir pertanyaan 100% valid dan pertanyaan pada tiap variabel menunjukkan pertanyaan yang reliabel (handal), instrumen sah untuk dilakukan dalam analisis berikutnya.

Dari hasil analisis secara bersama-sama, bahwa variabel regulasi (X1), variabel komitmen (X2), variabel sumber daya manusia (X3) dan variabel perangkat pendukung (X4) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana nilai $F = 5,776$ dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ sehingga keputusannya jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel regulasi (X1), variabel komitmen (X2), variabel sumber daya manusia (X3) dan variabel perangkat pendukung (X4) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara terpisah (*parsial*) pengaruh yang diberikan kedua variabel bebas yaitu variabel regulasi (X1) dan sumber daya manusia (X3) masih memberikan kontribusi secara signifikan atau mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dapat dikatakan bahwa variabel regulasi dan sumber daya manusia memiliki pengaruh yang kuat, sedangkan variabel komitmen (X2) dan perangkat pendukung (X4) mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan dalam artian tidak memberikan kontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mengetahui variabel manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk model regresi dari data yang dibakukan (*standardized*). Tujuan dari pembakuan data adalah untuk menyetarakan satuan dari setiap variabel. Dengan pembakuan data, satuan pada data setiap variabel akan hilang, sehingga setiap variabel layak untuk dibandingkan. Setiap variabel yang dibakukan akan memiliki rata-rata nol dan standar deviasi 1. Dari hasil analisis data yang dibakukan, variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah variabel regulasi (0,347 > 0,314). Dengan demikian, regulasi-lah yang merupakan penyebab terbesar dari

keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Azhar (2007) yang menyatakan bahwa regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2005. Azhar (2007) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa anggota SKPD enggan untuk mempelajari peraturan yang baru, diantara karena adanya perubahan yang begitu cepat dan sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya. Berdasarkan alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Analisis data dengan menggunakan model regresi linear berganda menghasilkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,293 menunjukkan bahwa variabel regulasi (X1), variabel komitmen (X2), variabel sumber daya manusia (X3) dan variabel perangkat pendukung (X4) sebagai variabel independen, mampu menjelaskan keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai variabel dependen sebesar 29,3% dan selebihnya 70,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Contoh dari faktor-faktor lain diluar model penelitian ini adalah kebijakan dibuatnya peraturan daerah tentang akuntansi berbasis akrual dengan melibatkan tenaga ahli serta menempatkan tenaga kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kebijakan, tenaga ahli dan latar belakang pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disimpulkan bahwa regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, SKPD di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa terbebani dengan adanya perubahan regulasi, karena mereka tidak mau mempelajari dan memahami setiap ada peraturan baru yang keluar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Azhar (2007) yang menyatakan bahwa regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2005. Azhar (2007) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa anggota SKPD enggan untuk mempelajari peraturan yang baru, diantara karena adanya perubahan yang begitu cepat dan sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya.

Reformasi regulasi dapat didefinisikan sebagai perubahan-perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka perbaikan kinerja ekonomi, efektifitas biaya, serta administrasi pemerintahan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan peningkatan kualitas regulasi melalui peningkatan kinerja, efektifitas biaya, kualitas regulasi, serta berbagai ketentuan formal lainnya. Pemerintah selaku regulator, diharapkan dapat menelurkan sejumlah kebijakan yang sejalan dengan semangat pegawai. Strategi reformasi yang komprehensif dibutuhkan untuk hasil yang efektif dan berkelanjutan karena tantangan yang sesungguhnya akan dihadapi pada saat kebijakan tersebut mulai diimplementasikan. Sejauh ini, hambatan implementasi yang dihadapi adalah kepentingan golongan dan tekanan dari berbagai pihak.

Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan dari lembaga yang berwenang dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penentu kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Kelemahan kebijakan lainnya terletak pada tidak adanya peraturan pelaksana (baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis). Akibat kondisi ini, maka pengaturan sistem ideal yang diinginkan pemerintah berhenti pada tataran kebijakan saja, dengan implementasi yang hampir tidak ada. Kelemahan lainnya terletak pada pengawasan implementasi kebijakan yang berada pada tataran minimal. Tidak jelas siapa yang harus menjadi pengawas sekaligus memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Faktor lain yang menjadi alasan mengapa pegawai enggan untuk mempelajari peraturan yang baru, diantara karena adanya perubahan regulasi yang begitu cepat dan sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya.

Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan komitmen segenap aparatur negara untuk mewujudkan keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yakni dengan melakukan pemberdayaan karyawan dengan mengoptimalkan waktu kerja yang ada, melakukan kebijakan promosi yang transparan, objektif dan independent sehingga dapat mendorong karyawan untuk kerja keras serta melakukan pengembangan karyawan secara kontinu dan sistemik.

Januarti, (2006: 15) mengemukakan komitmen organisasi terbangun bila tiap individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi meliputi *identification* yaitu pemahaman atau penghayatan dari tujuan organisasi, *involment* yaitu perasaan terlibat dalam suatu

pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaannya adalah menyenangkan, dan *loyalty* yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempat bekerja dan tempat tinggal. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajad komitmen adalah faktor intrinsik dan ekstrinsik karyawan bersangkutan. Faktor-faktor intrinsik karyawan dapat meliputi aspek-aspek kondisi sosial ekonomi keluarga karyawan, usia, pendidikan, pengalaman kerja, kestabilan kepribadian, dan gender. Sementara faktor-ekstrinsik yang dapat mendorong terjadinya derajad komitmen tertentu antara lain adalah keteladanan pihak manajemen khususnya manajemen puncak dalam berkomitmen di berbagai aspek organisasi. Selain itu juga dipengaruhi faktor-faktor manajemen rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan, manajemen kompensasi, manajemen kinerja, manajemen karir, dan fungsi kontrol atasan dan sesama rekan kerja.

Pengembangan sumberdaya manusia karyawan yang menyangkut kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial harus menjadi prioritas disamping ketrampilan teknis. Dukungan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manusia lainnya tidak boleh diabaikan. Kalau tidak diprogramkan secara terencana, maka pengingkaran pada komitmen sama saja memperlihatkan adanya kekeroposan suatu organisasi. Penurunan kredibilitas atau kepercayaan terhadap karyawan pada gilirannya akan mengakibatkan hancurnya kredibilitas instansi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi dapat mempengaruhi efektivitas kerja karyawan karena dengan memiliki komitmen yang tinggi maka seorang karyawan akan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan tertib dan lancar sehingga hasil kerjanya (kinerjanya) akan meningkat serta akan berdampak pula pada tujuan pemerintah yang dapat dicapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disimpulkan bahwa komitmen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini bertentangan dengan pernyataan yang diungkapkan Simanjuntak (2005 : 1) bahwa komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang, komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Warisno (2009), namun bertentangan dengan penelitian Azhar (2007) yang menyatakan ada pengaruh komitmen organisasi terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM memberikan kontribusi secara signifikan atau mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian azhar (2007) maupun warisno (2009), yang menyatakan bahwa ada pengaruh SDM terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan terhadap Kinerja SKPD. Peningkatan kualitas manusia merupakan kunci kesuksesan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat. Pembangunan akan berhasil bila dilakukan oleh tenaga-tenaga yang memiliki *skills* dan *knowledge* serta dilengkapi dengan sifat-sifat serta sikap-sikap yang mendukung.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memberikan perhatian kepada birokrasi untuk meningkatkan SDM bagi mereka yang pernah dipromosikan atau menduduki jabatan baru. Alasannya adalah bahwa mereka yang menduduki jabatan baru atau yang lebih tinggi semakin lama semakin tidak kualified (kurang kompeten) karena menduduki posisi yang kurang sesuai dengan keahlian mereka ketika diangkat untuk pertama kalinya. Bagi mereka yang dianggap belum mampu melakukan pekerjaan dan tidak bersedia melakukan penyesuaian tingkah laku, strategi peningkatan SDMnya dapat dilakukan melalui "*trainning*". Bagi mereka yang mampu melakukan pekerjaan tetapi tidak menginginkan perubahan tingkah lakunya, diperlukan "*coaching*" dan bagi mereka yang mampu melakukan pekerjaan yang dibutuhkan sementara bersedia melakukan, perubahan pada tingkah lakunya, diperlukan '*menontoring*'. Dari beberapa peserta yang telah mengikuti program pelatihan sumberdaya manusia, bahwa meskipun ia telah mengikuti berbagai "*short training*" hasil peningkatan SDM ini tidak segera dinikmati. Hal ini disebabkan oleh kepangkatan mereka yang masih rendah dimana mereka tidak dapat secara leluasa bertindak sesuai dengan profesi mereka. Dalam kata lain, banyak staf telah mengikuti training tetapi tidak dapat berbuat banyak karena belum diberi keleluasaan untuk bertindak atau melakukan perbaikan sesuai dengan ilmu atau keterampilan yang diperoleh pada waktu kursus atau pelatihan. Peningkatan SDM seharusnya dibarengi dengan perubahan orientasi yaitu dari birokratisasi ke profesionalisasi dimana lebih banyak ruang diberikan kepada "*profesional discretion*" (keleluasaan untuk melakukan tindakan sesuai dengan profesi yang dimiliki). Bila tidak, peningkatan SDM pada organisasi publik hanya merupakan kegiatan yang sia – sia, bahkan

orang akan melihat usaha peningkatan SDM sebagai suatu jenis bisnis rutin dari pihak tertentu saja. Dalam konteks organisasi publik diperlukan bentuk-bentuk reformasi tertentu. Bentuk yang paling penting adalah profesionalisasi birokrasi dimana setiap aparat diharapkan lebih melakukan pekerjaanya sesuai dengan *skills* dan *knowledge* yang dimiliki, dan evaluasi secara reguler mengenai kesesuaianya dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan. Dan bentuk yang kedua yang sama pentingnya adalah kebijakan desentralisasi yang lebih memberikan ruangan kepada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya secara lebih leluasa sesuai dengan prinsip profesi yang dimilikinya. Beberapa organisasi publik nampaknya telah melakukan semacam terobosan tertentu, yang berarti organisasi publik sebenarnya dapat merubah atau menyesuaikan diri.

Berdasarkan hasil penelitian di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disimpulkan bahwa perangkat pendukung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Azhar (2007) yang mengatakan bahwa ada pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006, namun sesuai dengan hasil penelitian Warisno (2009) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan Kinerja.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memiliki kebijakan dan prosedur perencanaan kapasitas untuk dapat memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sesuai dengan kebutuhan operasional dan mengantisipasi perkembangan usaha pelayanan. Tanpa perencanaan kapasitas

yang baik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menghadapi risiko kekurangan atau bahkan pemborosan sumber daya teknologi informatika. Perencanaan kapasitas hendaknya disusun untuk jangka waktu cukup panjang dan untuk mengakomodir perubahan yang ada. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menetapkan kebijakan inventarisasi dan pengkinian informasi perangkat keras dan perangkat lunak, perangkat jaringan, media penyimpanan dan perangkat pendukung lainnya. Inventarisasi perangkat keras harus dilakukan secara menyeluruh termasuk inventarisasi terhadap perangkat keras yang dimiliki oleh pihak lain tetapi berada di Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi yang penting antara lain nama vendor dan model, tanggal pembelian dan instalasi, kapasitas processor, memori utama, kapasitas penyimpanan, sistem operasi, fungsi, dan lokasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus melakukan inventarisasi atas informasi mengenai nama dan jenis perangkat lunak (sistem operasi, sistem aplikasi, atau sistem utilitas. Informasi lain yang harus dicakup dalam inventarisasi perangkat lunak meliputi nama pembuat atau vendor, tanggal instalasi, nomor versi dan keluaran (*release*), pemilik perangkat lunak, *setting parameter* dan service yang aktif, jumlah lisensi yang dimiliki, jumlah yang di-install dan jumlah user. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu membuat kebijakan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak (*Disposal*), meliputi penghapusan perangkat lunak, perangkat keras, dan data yang sudah tidak digunakan lagi atau yang masa retensinya telah habis. *Source code* versi lama yang sudah tidak dipakai lagi harus disimpan dengan indikasi yang jelas mengenai

tanggal, waktu dan informasi lain ketika digantikan dengan *source code* versi terbaru.

Universitas Terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini jalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Tetapi secara terpisah (*partial*) pengaruh yang diberikan kedua variabel bebas yaitu regulasi dan Sumber Daya Manusia masih memberikan kontribusi atau mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil analisis data yang dibakukan, variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah regulasi ($0,347 > 0,314$).

B. Saran

Memperhatikan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal yang akan disarankan yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan peningkatan kinerja, yaitu dengan:

- a. Kekhitusan

Hal ini bisa dicapai dengan manajemen *Job Description* (pembagian bidang kerja, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, dll) yang baik. Point ini dapat pula diwujudkan dengan penempatan orang yang tepat pada posisi/jabatan yang sesuai bidang keahliannya (*right man in the right job*)

- b. Konsistensi

Sistem monitoring dan evaluasi kantor/tempat kerja harus mempunyai arah capaian/standar kinerja dan target yang jelas. Hal ini akan mempermudah kantor/tempat kerja dalam melihat perkembangan kemajuan yang telah dicapai dan data laporan yang akurat. Sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang baik.

- c. Waktu yang tepat

Umpulan balik sebaiknya segera diberikan, agar karyawan termotivasi untuk memperbaiki.

- d. Komunikasi yang efektif

Komunikasi efektif sangat berperan vital dalam penciptaan suasana kerja yang sehat. Instruksi atasan yang jelas dan benar harus dapat dipahami oleh karyawan. Pada saat terdapat masalah, harus secepatnya diselesaikan.

Bila terdapat unsur-unsur konflik baik vertikal (pimpinan-bawahan) maupun horizontal (sesama karyawan) dalam suatu kantor/tempat kerja dibiarkan berlarut, sangat berpotensi mengganggu stabilitas iklim kerja.

e. Niat baik dan kerjasama

Pimpinan perlu menunjukkan niat baik dan kerjasama. Karyawan yang ikut memberikan ide dalam menetapkan sasaran atau standar kinerja, berarti telah mengemukakan kehendak dan kebutuhannya.

2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan peningkatan kualitas regulasi dengan menerapkan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
3. Adanya perubahan regulasi yang begitu cepat dan sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya, maka perlu adanya peraturan pelaksana (baik perunjuk pelaksanaan maupun perunjuk teknis) dengan menetapkan peraturan gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
4. Untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan pemberdayaan karyawan dengan mengoptimalkan waktu kerja yang ada, melakukan kebijakan promosi yang transparan, objektif dan independent sehingga dapat mendorong karyawan untuk kerja keras serta melakukan pengembangan karyawan secara kontinu dan sistemik.
5. Strategi peningkatan SDM dapat dilakukan melalui "*training*". Bagi mereka yang mampu melakukan pekerjaan tetapi tidak menginginkan perubahan tingkah lakuinya, diperlukan "*coaching*" dan bagi mereka yang mampu

melakukan pekerjaan yang dibutuhkan sementara bersedia melakukan perubahan pada tingkah lakunya, dipertukar "monitoring". Peningkatan SDM juga harus dibarengi dengan perubahan orientasi yaitu dari birokratisasi ke profesionalisasi dimana lebih banyak ruang diberikan kepada "*professional discretion*" (keleluasaan untuk melakukan tindakan sesuai dengan profesi yang dimiliki). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan profesionalisasi birokrasi dimana setiap uparat diharapkan lebih melakukan pekerjaannya sesuai dengan *skills* dan *knowledge* yang dimiliki, dan evaluasi secara reguler mengenai kesesuaianya dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan. Dan kebijakan desentralisasi yang lebih memberikan ruangannya kepada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya secara lebih leluasa sesuai dengan prinsip profesi yang dimilikinya.

6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memiliki kebijakan dan prosedur perencanaan kapasitas untuk dapat memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan operasional dan mengantisipasi perkembangan usaha pelayanan. Menetapkan kebijakan inventarisasi dan pengkinian informasi perangkat keras dan perangkat lunak, perangkat jaringan, media penyimpan dan perangkat pendukung lainnya. Serta membuat kebijakan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak (*Disposal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agusyana, Yus dan Islandscripl. (2011). *Olah Data Skripsi dan Penelitian dengan SPSS 19*. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ancok, Djamarudin. (1998). *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Azhar. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. "Tesis 'S2'" Program Pasca Sarjana USU, Medan.
- Baridwan, Z. (1991). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Benyamin, H. (1995). *Peranan Administrator Pemerintah Daerah*. Jakarta. LP3ES Indonesia.
- Dum, William N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dum, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghozali, Imam. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. BP Undip. Semarang.
- Hafim, Abdul. (1997). *Bunga Rangai Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/STANDAR%20OPERASIONAL%20PROSEDUR.pdf
- Jones, Charles O. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juniarti Indira, Ashari Bunyaamudin. (2006). *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Keterlibatan Kerja Islam Dengan Sikap terhadap Perubahan Organisasi*.
- Kaho, Josef Riwu. (2002). *Prospek Otonomi Daerah: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaradannya*. Jakarta: Rajawali Press.

- Kurniawan, D. (2008). *Regresi Linier (Linear Regression)*.
<http://ineddeni.wordpress.com>
- Lubis, Ade Fatma dan Syahputra, Adi (2008). *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*. Program Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana USU. Medan
- Luthans, Fred. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi 10. Andi. Yogyakarta
- Michael E. K. & Scott R. F. (2007). *Public Policy: Politics, Analysis, Alternatives*. Second edition, Washington DC: CQ Press.
- Mulyono, S. (2007). "Struktur Hardware Komputer". *Jurnal Struktur Komputer*, Vol.3, Nomor 1, Hal 6-7.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi Pertama. Bandung: Refika ADITAMA.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Klex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan – Berbasis Akrual*.
- Rasyid, M. R. (1997). *Makna Pemerintahan; Tinjauan Dari Segi Etika dan Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.

- Riduan dan Sunarto. (2009). *Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- R. Matindas. (2002). *Manajemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan, dan Usaha*. Edisi II. Jakarta: Grafiti.
- Saefullah, Djadja.(1999). *Publik, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Bandung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Press UNPAD.
- Sardjonoopermono I. (1981). *Seklumil Analisa Regresi dan Korelasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Simamora, Henry. (2004). *Akuntansi Pengambilan Keputusan Bisnis*. Edisi kedua. Salemba empat. Jakarta.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Edisi I. Jakarta: Fokus Media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD tahun 2007, tentang *Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Susilo, W. (2002). *Audit Sumber Daya Manusia*. Penerbit Gema Amini. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang *Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Warisno, 2009. " Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Jambi". Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Wikipedia. (2011). Kebijakan. Diambil 30 Oktober 2011, dari situs World Wide Web. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>
- www.ksap.org

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Responden

Nama (boleh tidak diisi)

Jabatan (boleh tidak diisi)

Dinas/Instansi

Pendidikan Terakhir

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | SLTA/Sederajat |
| <input type="checkbox"/> | Diploma (D3) |
| <input type="checkbox"/> | Sarjana (S1) |
| <input type="checkbox"/> | Pasca Sarjana (S2) |
| <input type="checkbox"/> | Doktoral (S3) |

Pangkat/Golongan

- | | |
|--------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Golongan IV |
| <input type="checkbox"/> | Golongan III |
| <input type="checkbox"/> | Golongan II |

Lama Bekerja

- | | |
|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | ≤ 5 tahun |
| <input type="checkbox"/> | 6 – 10 tahun |
| <input type="checkbox"/> | 11 – 15 tahun |
| <input type="checkbox"/> | 16 – 20 tahun |
| <input type="checkbox"/> | > 21 tahun |

Kursus/Diklat/Bimtek di bidang Akuntansi, keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang telah bapak/ibu ikuti:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Tidak pernah |
| <input type="checkbox"/> | Meminjam sekali |
| <input type="checkbox"/> | Pernah |
| <input type="checkbox"/> | Sering |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Sering |

II. Pertanyaan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Basis Akrual.

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan memberikan tanda (✓). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati.

No.	Pernyataan/Pertanyaan	1	2	3	4	5	SKOR Jawaban
I. REGULASI							
1	Apakah Bapak atau Ibu membaca aturan-aturan yang ada dalam PP 71 Tahun 2010, 1. Tidak pernah 2. 1 kali 3. 2 kali 4. 3 kali 5. > 4 kali						1. Sangat tidak sering 2. Tidak sering 3. Cukup sering 4. Sering 5. Sangat sering
2	Apakah Bapak atau Ibu memahami perubahan atau perbedaan dalam PP 71 tahun 2010 (SAP berbasis Akrual) dan PP 24 tahun 2005 (SAP berbasis Kas Modifikasi Akrual)? 1. Tidak sama sekali 2. Sangat kurang 3. Kurang 4. Paham 5. Sangat paham						1. Sangat tidak memahami 2. Tidak memahami 3. Cukup memahami 4. Memahami 5. Sangat memahami
3	Jika Bapak atau Ibu mempelajari aturan-aturan dalam PP 71 tahun 2010 (SAP berbasis Akrual), apakah Bapak atau Ibu dapat melakukan perubahan atau melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada tersebut pada tahun: 1. Ragu - ragu 2. Tahun 2013 - 2014 3. Tahun 2012 - 2013 4. Tahun 2011 - 2012 5. Tahun 2010 - 2011						1. Sangat lama 2. Lama 3. Cukup 4. Cepat 5. Sangat cepat
		1	2	3	4	5	SKOR Jawaban

II. KOMITMEN							
1	Saya akan membuat laporan keuangan sesuai dengan PP 71 tahun 2010, untuk periode: 1. Ragu - ragu 2. Tahunan 3. Semesteran 4. Triwulanan 5. Bulanan						1. Sangat rendah 2. rendah 3. Cukup 4. Tinggi 5. Sangat tinggi
2	Saya akan berusaha menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual: 1. Ragu - ragu 2. Tahun 2013 - 2014 3. Tahun 2012 - 2013 4. Tahun 2011 - 2012 5. Tahun 2010 - 2011						1. Sangat rendah 2. rendah 3. Cukup 4. Tinggi 5. Sangat tinggi

		1	2	3	4	5	SKOR Jawaban
III.	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)						
1.	Bidang pekerjaan menurut bidang formalnya pendidikan 1. Lainnya (mis. S.Ag, ST, dll) 2. Manajemen 3. Administrasi 4. Komputer Akuntansi 5. Akuntansi dan Keuangan						1. Sangat tidak relevan 2. Kurang relevan 3. Cukup relevan 4. Relevan 5. Sangat relevan
2.	Lamanya bekerja di bidang Akuntansi dan Pelaporan 1. 0 – 1 tahun 2. 1 – 2 tahun 3. 2 – 3 tahun 4. 3 – 4 tahun 5. 4 – 5 tahun						1. Sangat tidak berpengalaman 2. Kurang berpengalaman 3. Cukup berpengalaman 4. Pengalaman 5. Sangat berpengalaman
3.	Pemahaman mengenai ilmu akuntansi, misalnya (neraca, LRA, Cal.K, arus kas, dll) 1. Sangat kurang 2. Kurang 3. Cukup 4. Paham 5. Sangat paham						1. Sangat tidak memahami 2. Kurang memahami 3. Cukup 4. Memahami 5. Sangat memahami
4.	Frekuensi pelatihan yang pernah diikuti dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, misalnya (tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, dll): 1. Tidak pernah 2. 1 kali 3. 2 kali 4. 3 kali 5. > 4 kali						1. Sangat kurang 2. Kurang 3. Cukup 4. Banyak 5. Sangat banyak

		1	2	3	4	5	SKOR Jawaban
IV.	PERANGKAT PENDUKUNG						
1.	Jumlah Perangkat pendukung kegiatan / pekerjaan yang tersedia sudah sesuai dengan jumlah pemakai, misalnya (komputer, dll)						1. Sangat kurang 2. Kurang 3. Cukup 4. Banyak 5. Sangat banyak
2.	Sistem operasi komputer yang digunakan, contoh: 1. DOS 2. Windows ME 3. Tidak tau 4. Windows XP 5. Windows Vista						1. Sangat tidak memadai 2. Tidak memadai 3. Cukup memadai 4. Memadai 5. Sangat memadai
3.	Komputer (PC) dengan prosessor 1. Tidak punya 2. Dibawah Pentium 4 3. Pentium 4 4. Dual Core 5. Core Two Duo						1. Sangat tidak canggih 2. Tidak canggih 3. Cukup canggih 4. Canggih 5. Sangat canggih
4.	Aplikasi yang digunakan 1. Tidak tau 2. Manual 3. Microsoft Office 4. SIMDA 5. SIPKD						1. Sangat tidak memadai 2. Tidak memadai 3. Cukup memadai 4. Memadai 5. Sangat memadai
		1	2	3	4	5	
V.	PENERAPAN PP 71 TAHUN 2010 - SAP Basis Akrual						
1.	Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan sesuai dengan PP 71 tahun 2010 basis akrual dapat dilaporkan: 1. Tidak tau 2. Tahunan 3. Semesteran 4. Triwulan 5. Bulanan						1. Sangat tidak berhasil 2. Tidak berhasil 3. Cukup berhasil 4. Berhasil 5. Sangat berhasil
2.	Entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual: 1. Ragu - ragu 2. Tahun 2013 - 2014 3. Tahun 2012 - 2013 4. Tahun 2011 - 2012 5. Tahun 2010 - 2011						1. Sangat tidak berhasil 2. Tidak berhasil 3. Cukup berhasil 4. Berhasil 5. Sangat berhasil

LAMPIRAN 2
TABEL SKOR HASIL KUESIONER

LAMPIRAN 3
HASIL UJI VALIDITAS ITEM PERTANYAAN VARIABEL REGULASI (X1)

Reliability

Notes

Output Created		24-Nov-2011 16:33:33
Comments		
Input	Data	E:\rahmansah\CTESIS\olah kuesioner\regulasi.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	47
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=regulasi1 regulasi2 regulasi3 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL
Resources	Processor Time	00:00:00.000
	Elapsed Time	00:00:00.010

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	47	100.0
	Excluded ^a	0	0
Total		47	100.0

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	47	100.0
Excluded ^a	0	0
Total	47	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.738	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
regulasi1	6.2128	3.823	.668	.519
regulasi2	6.8085	5.028	.444	.782
regulasi3	6.9787	4.826	.589	.621

LAMPIRAN 4
HASIL UJI VALIDITAS ITEM PERTANYAAN VARIABEL KOMITMEN (X2)

Reliability**Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	47	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	47	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	2

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
komitmen1	3.9362	+.018	.749	"
komitmen2	3.5319	1.298	.749	"

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

LAMPIRAN 5
HASIL UJI VALIDITAS ITEM PERTANYAAN VARIABEL SDM (X3)

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

	N	%
Cases Valid	47	100.0
Excluded ^a	0	0
Total	47	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.680	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
sdm1	9.6170	6.783	.515	.579
sdm2	9.6170	7.285	.389	.663
sdm3	9.6809	6.700	.493	.593
sdm4	9.8936	7.445	.456	.616

LAMPIRAN 6
HASIL UJI VALIDITAS ITEM PERTANYAAN VARIABEL PERANGKAT
PENDUKUNG (X4)

Reliability**Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	47	100.0
Excluded*	0	0
Total	47	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.863	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean If Item Deleted	Scale Variance If Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha If Item Deleted
perangkat1	10.2553	3.573	.555	.510
perangkat2	10.0426	3.858	.635	.455
perangkat3	10.0000	4.565	.462	.590
perangkat4	11.3191	5.918	.184	.745

LAMPIRAN 7
**HASIL UJI KE-2 VALIDITAS ITEM PERTANYAAN VARIABEL PERNAGKAT
 PENDUKUNG (X4)**

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

	N	%
Cases Valid	47	100.0
Excluded ^a	0	0
Total	47	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
perangkat1	7.7021	2.431	.571	.536
perangkat2	7.4894	3.036	.582	.650
perangkat3	7.4468	3.426	.479	.760

LAMPIRAN 8
HASIL UJI VALIDITAS ITEM PERTANYAAN VARIABEL PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 (Y)

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	47	100.0
	Excluded ^a	0	0
	Total	47	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.680	2

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
keberhasilan1	3.5957	.985	.517	.
keberhasilan2	2.9362	1.191	.517	.

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

LAMPIRAN 9
HASIL UJI DATA STATISTIK KOLMOGOROV-SMIRNOV

NPar Tests**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		residual
N		47
Normal Parameters ^a	Mean	6.5319
	Std. Deviation	1.08185
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.079
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.567
Asymp. Sig. (2-tailed)		.905
a. Test distribution is Normal.		

LAMPIRAN 10
HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	6,5319	1,81600	47
X1	10,0000	2,95620	47
X2	7,4681	2,00923	47
X3	12,9362	3,36481	47
X4	11,3191	2,43263	47

Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4
Pearson Correlation	Y	1,000	-.505	.004	-.507	.123
	X1	.506	1,000	.172	-.553	-.039
	X2	-.004	.172	1,000	-.176	-.236
	X3	.507	-.653	-.176	1,000	.042
	X4	-.123	.039	-.236	.042	1,000
Sig. (1-tailed)			.000	.489	.000	.205
N	Y			.124	.000	.397
	X1	.000			.119	.055
	X2	.489	.124			.389
	X3	.000	.000	.119		
N	X4	.205	.397	.055	.389	-
	Y	47	47	47	47	47
	X1	47	47	47	47	47
	X2	47	47	47	47	47
	X3	47	47	47	47	47
	X4	47	47	47	47	47

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4, X1, X2, X3 ^a		Enter

a. All requested variables entered

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.596 ^a	.355	.293	1.52646	.355	5.776	4	42	.001	1.575

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	53.838	4	13.450	5.776	.001 ^a
Residual	97.854	42	2.330		
Total	151.702	46			

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^b

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.882	1.860		.2087	.043			
X1	.213	.097	.347	2.191	.034	.813	1.632	
X2	-.042	.124	-.047	-.338	.737	.810	1.235	
X3	.170	.085	.314	1.990	.053	.616	1.622	
X4	-.120	.096	-.161	-1.255	.217	.934	1.070	

a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations^a

Model		X4	X1	X2	X3	
1	Correlations	X4	.100	-.104	.252	.052
		X1	-.104	1.000	-.342	-.503
		X2	.252	-.342	1.000	.334
		X3	.062	-.603	.334	1.000
Covariances	X4		.009	.000	.003	.001
	X1		.000	.009	-.004	-.005
	X2		.003	-.004	.015	.004
	X3		.001	-.005	.004	.007

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	X1	X2	X3	X4
1	1	4.812	1.000	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.083	7.634	.00	.06	.38	.12	.00
	3	.065	8.535	.01	.29	.08	.01	.34
	4	.030	12.759	.02	.67	.03	.53	.16
	5	.010	21.794	.95	.06	.50	.33	.50

a. Dependent Variable: Y

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	Y	Predicted Value	Residual
1	-.539	6.00	6.8225	-.8225
2	2.133	9.00	5.7440	3.2560
3	.774	7.00	5.8185	1.1815
4	.557	7.00	6.1502	.6497
5	-.488	6.00	6.7446	-.7446
6	.499	9.00	8.2389	7.5113
7	.143	9.00	8.7824	.2175
8	-.055	7.00	7.0837	-.0837
9	-.627	4.00	4.9576	-.9576
10	-.307	6.00	6.4684	-.4684
11	-.010	5.00	5.0146	-.0146

12	-191	9.00	9.2912	-29115
13	1.228	9.00	7.1258	1.87417
14	748	6.00	4.8587	1.14134
15	125	6.00	5.8098	.19023
16	.096	8.00	7.8537	14632
17	357	6.00	5.4543	.54570
18	2.017	10.00	6.9212	3.07879
19	-915	5.00	6.3965	-1.39652
20	-1.251	3.00	4.9095	-1.90948
21	-2.004	3.00	5.0586	-3.05863
22	.659	6.00	4.9787	1.02126
23	.691	7.00	5.8449	1.05514
24	-.825	7.00	8.2600	-1.25998
25	.494	6.00	5.2450	.75395
26	1.148	9.00	7.2472	1.75275
27	1.130	8.00	6.2750	1.72497
28	.413	8.00	7.3692	.63086
29	1.051	8.00	6.3951	1.60489
30	.053	7.00	6.9189	.08110
31	.227	7.00	6.6532	.34878
32	.599	8.00	7.0850	.91497
33	-.160	7.00	7.2443	-2.4430
34	-1.508	5.00	7.3015	-2.30150
35	.336	8.00	7.4874	.51259
36	.572	8.00	7.1272	.87284
37	-.766	4.00	5.1693	-1.16934
38	-1.489	4.00	6.2724	-2.27236
39	.274	5.00	4.5813	.41866
40	.820	6.00	6.7482	1.25180
41	-2.293	4.00	7.5000	-3.50003
42	-1.132	5.00	6.7282	-1.72822
43	-1.267	3.00	4.9342	-1.93423
44	.141	7.00	6.7840	.21588
45	.350	8.00	7.4663	.53474
46	-.643	5.00	5.9814	-.98138
47	-1.177	5.00	6.7974	-1.79741

Coefficient Correlations^a

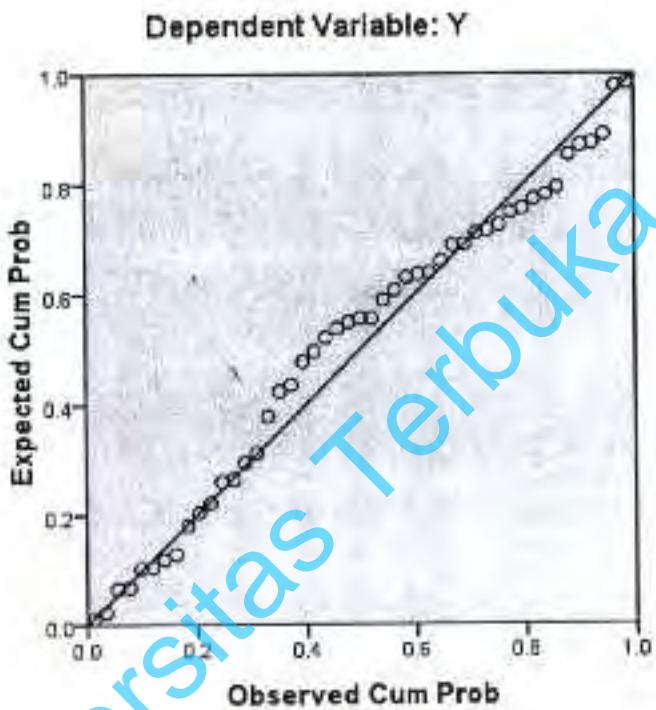
Model		X4	X1	X2	X3	
1	Correlations	X4	1.000	- .104	.252	.062
		X1	-.104	1.000	-.342	-.603
		X2	.252	-.342	1.000	.334
		X3	.062	-.603	.334	1.000
	Covariances	X4	.009	.000	.003	.001
		X1	.000	.009	-.004	-.005
		X2	.003	-.004	.015	.004
		X3	.001	-.005	.004	.007

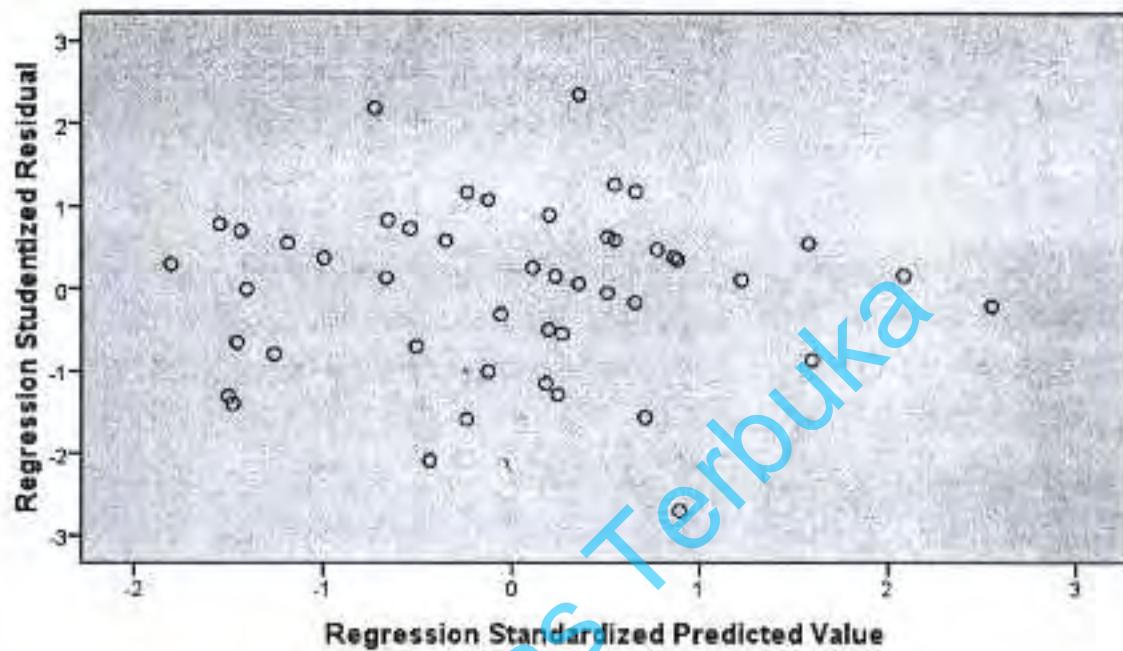
a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.5813	9.2912	6.5319	1.08185	47
Std. Predicted Value	-1.803	2.559	.000	1.000	47
Standard Error of Predicted Value	.258	.805	.478	.140	47
Adjusted Predicted Value	4.5185	9.3651	6.5499	1.12424	47
Residual	-3.50003	3.25005	.00000	1.45859	47
Std. Residual	-2.293	2.133	.000	.956	47
Stud. Residual	-2.608	2.348	-.005	1.028	47
Deleted Residual	-4.84693	4.16707	.01798	1.68815	47
Stud. Deleted Residual	-2.032	2.487	-.010	1.080	47
Mahal. Distance	.319	11.804	3.915	2.880	47
Cook's Distance	.900	.560	.035	.098	47
Centered Leverage Value	.007	.257	.085	.063	47

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 11**Charts****Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Scatterplot**Dependent Variable: Y**

LAMPIRAN 12

Azwar Juliani & Et. K
<http://www.azwarjuliani.com/tabel/>

Tabel r

N	Tarat Signif		N	Tarat Signif		N	Tarat Signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,476	60	0,254	0,330
5	0,878	0,950	29	0,387	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,483	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,288
9	0,668	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,438	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,578	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,258
13	0,553	0,684	37	0,325	0,416	105	0,178	0,250
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	110	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	115	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	120	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,396	130	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	140	0,098	0,126
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	150	0,085	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	160	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	170	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	180	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	190	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	200	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			

Sumber: Sugiyono (1999). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta